

**UPAYA KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMP NEGERI 1 MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Khurin'in Damayanti
04110142



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG**

Juni, 2008

**UPAYA KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMP NEGERI 1 MALANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana
Pendidikan Islam (S.Pd.I)*

Oleh:

Khurin'in Damayanti

04110142



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG**

Juni, 2008

HALAMAN PERSETUJUAN

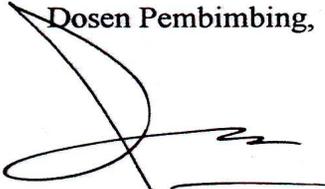
**UPAYA KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMP NEGERI 1 MALANG**

SKRIPSI

Oleh:
Khurin'in Damayanti
04110142

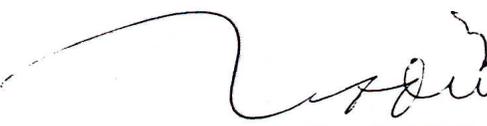
Telah Disetujui Tanggal:
28 Juli 2008

Dosen Pembimbing,



Dr. Nur Ali, M.Pd
NIP. 150 289 265

Mengetahui,
Ketua Jurusan Tarbiyah UIN Malang



Drs. Moh. Padil, M.Pd.I
NIP. 150 267 235

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMP NEGERI 1 MALANG
SKRIPSI

Dipersiapkan dan Disusun Oleh
Khurin'in Damayanti (04110142)
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal
24 Juli 2008 Dengan Nilai A
dan Telah Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
Pada Tanggal: 28 Juli 2008.

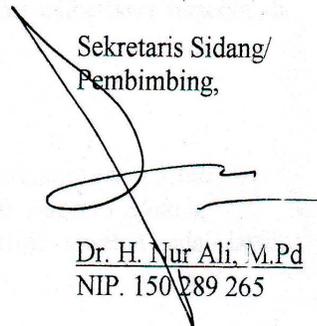
Panitia Ujian

Ketua Sidang,



Drs. H. M. Syahid, M.Ag
NIP.150 035 110

Sekretaris Sidang/
Pembimbing,



Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 150 289 265

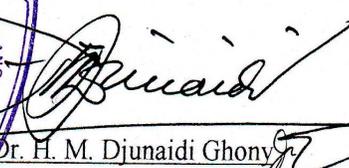
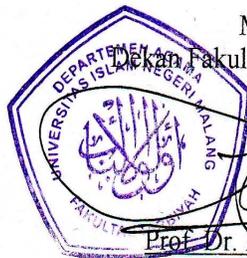
Penguji Utama,



Prof. Dr. H. M. Djunaidi Ghony
NIP. 150 042 031

Mengesahkan,

Dekan, Fakultas Tarbiyah UIN Malang



Prof. Dr. H. M. Djunaidi Ghony
NIP. 150 042 031

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 24 Juni 2008



Khurin'in Damayanti

HALAMAN MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ

اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 148)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan teruntuk Ayahanda M. Ali Shodiqin dan Ibunda Titik Istiqomah yang tak pernah henti memberikan kasih sayang, do'a dan pengorbanannya dengan setulus hati, dan adik-adikku Agus M. Husnul Aqib dan Iqbal Fadli yang selalu memberi dukungan dalam kehidupanku.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagimu Ya Robbi atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah menyalakan lentera kebenaran dalam kalbu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang” sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd.I) yang dengan tertatih-tatih akhirnya dapat diselesaikan.

Bagimu Ya Rasulallah, shalawat serta salam selalu tercurahkan, karena penulis sadar bahwa engkau adalah penunjuk kebenaran dan penyejuk hati semua insan di muka bumi Allah ini.

Teriring dengan selesainya skripsi ini, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah menanamkan norma hidup dan nilai cinta kasih dengan segala pengorbanan dan jerih payahnya demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga dengan iringan do'a dan motivasinya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Djunaedi Ghony selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

4. Bapak Drs. Moh. Padil, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
5. Bapak Dr. H. Nur Ali, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dengan penuh pengertian, ketelatenan dan kesabaran memberikan bimbingan dan arahan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Burhanuddin, M.Pd selaku kepala SMP Negeri 1 Malang yang telah bersedia memberikan izin, tempat dan informasi tentang masalah-masalah yang ada dalam laporan skripsi ini.
7. Dewan guru SMP Negeri 1 Malang beserta stafnya yang telah memberikan bantuan dalam perolehan data untuk penyusunan laporan skripsi ini.
8. Seseorang yang telah hadir dalam kehidupanku Achmad Mukhotib yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas cinta, kasih sayang dan pengorbanannya.
9. Teman-teman kuliah setia penulis Mbak Ita, Pak Yai, Jijex, Lala dan Fifi serta anak kost Isnasib yang sedikit banyak ikut andil memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak kuasa penulis sebutkan satu-persatu yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Hanya dengan iringan do'alah peneliti panjatkan, semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Keberadaan laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena kedangkalan dan keterbatasan ilmu penulis, tiada kebenaran yang tak luput dari kesalahan. Di atas langit masih ada langit, karena itu, dengan hati yang ikhlas penulis sangat

mengharapkan koreksi dari pembaca yang budiman dan kritik konstruktif selalu peneliti harapkan.

Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Amin.. Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis pasrah diri atas segala kekhilafan penulis sebagai hamba yang dho'if dengan segala maghfirohnya.

Penulis

Khurin'in Damayanti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGANTAR.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
NOTA DINAS PEMBIMBING	V
SURAT PERNYATAAN.....	VI
HALAMAN MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL	XVI
DAFTAR GAMBAR.....	XVII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XVIII
ABSTRAK	XIX
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Komite Sekolah.....	16
1. Pengertian komite sekolah	17
2. Tujuan komite sekolah.....	18
3. Peran dan fungsi komite sekolah	19
4. Organisasi komite sekolah	26
5. Pelaksanaan komite sekolah	30
B. Mutu Pendidikan Agama Islam	35
1. Pengertian mutu pendidikan agama Islam	35
2. Indikator mutu pendidikan agama Islam.....	49
3. Karakteristik mutu pendidikan agama Islam	51
4. Prinsip-prinsip mutu pendidikan agama Islam	53
C. Upaya Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam	57
D. Kendala Yang Dihadapi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam	63

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	66
B. Kehadiran Peneliti.....	67
C. Lokasi Penelitian.....	67
D. Sumber Data.....	68
E. Metode Pengumpulan Data.....	68
1) Metode wawancara	69
2) Metode observasi	70

3) Metode studi dokumentasi	70
F. Teknik Analisis Data.....	71
G. Pengecekan Keabsahan Data	73
H. Tahap-Tahap Penelitian	75
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Latar Belakang Obyek	77
1. Sejarah berdiri dan berkembangnya SMP Negeri 1 Malang	77
2. Visi dan misi SMP Negeri 1 Malang	78
3. Sejarah berdirinya komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang	79
4. Struktur organisasi sekolah dan komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang	80
5. Keadaan guru di SMP Negeri 1 Malang	82
6. Keadaan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Malang	84
7. Keadaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Malang	85
8. Prestasi akademik dan non akademik SMP Negeri 1 Malang	85
B. Paparan Data	86
1. Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang..	86
2. Upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang	90
3. Kendala yang dihadapi komite sekolah dalam Meningkatkan mutu pendidikan agama Islam	

di SMP Negeri 1 Malang 93

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang 97

B. Upaya Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang 100

C. Kendala Yang Dihadapi Komite Sekolah Dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam

di SMP Negeri 1 Malang 103

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 106

B. Saran-Saran 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL I: INDIKATOR PERAN KOMITE SEKOLAH..... 24



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I: STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH	29
GAMBAR II: STRUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 1 MALANG	81
GAMBAR III: STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 MALANG	82



ABSTRAK

Khurin'in Damayanti, 2008. *Upaya Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dr. H. Nur Ali, M.Pd.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Mutu Pendidikan Agama Islam.

Dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan adanya dukungan dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dan orang tua/wali siswa perlu disalurkan secara terorganisir melalui suatu lembaga. Salah satu lembaga tersebut adalah melalui komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah merupakan sebuah lembaga mandiri atas prakarsa masyarakat yang peduli akan pendidikan. Secara singkat tujuan komite sekolah adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan operasional dan membantu sekolah dalam kelancaran pendidikan di sekolah dalam upaya memelihara, menumbuhkan dan pengawasan. Sedangkan peran komite sekolah diantaranya adalah pemberi pertimbangan (*advisory agency*), sebagai badan pendukung (*Supporting Agency*), sebagai pengontrol (*Controlling Agency*), dan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat (*Mediator Agency*). Dalam menjalankan perannya, pastinya ada upaya-upaya yang dilakukan komite sekolah khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam, karena selama ini kebanyakan yang dilakukan komite sekolah dalam peningkatan mutu hanya berfokus pada masalah fisik saja yakni dalam hal sarana dan prasarana, dan kurang memperhatikan masalah non fisik yakni masalah pembelajaran terutama pendidikan agama Islam.

Fokus penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang?, 2) Upaya apa yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang?, dan 3) Apakah kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang?.

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang: 1) mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang, 2) upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang, dan 3) kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang.

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan keabsahan datanya dicek menggunakan teknik *triangulasi*, menggunakan bahan referensi dan teknik *member check*.

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang cukup baik, karena secara umum dapat dilihat dari mutu masukan, mutu proses dan mutu lulusan yang unggul. *Kedua*, Upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang diantaranya dengan mengadakan *parent's day*, menggalang dana, rapat tahunan dan ikut serta dalam kegiatan hari besar Islam, istighosah dan memberi bantuan fisik. Dan

ketiga, kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang adalah adanya kendala internal, yaitu terletak dalam hal teknik dan administrasi serta dalam diri pribadi masing-masing personil komite sekolah dan kendala eksternal, yaitu terletak pada orang tua siswa dan masyarakat serta dari sekolah itu sendiri. Jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam hendaknya antara pihak sekolah, komite sekolah, orang tua serta masyarakat saling bekerja sama dan mempunyai komitmen demi terwujudnya pendidikan yang bermutu.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah sebagai wahana untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di masyarakat, lancar dan tidaknya realisasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Kemampuan yang dibutuhkan antaranya adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola dinamika masyarakat, kemampuan untuk mengalokasikan sumber finansial daya alam secara tepat, memotifasi lembaga-lembaga pendukung pembangunan, serta keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan untuk kemajuan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.¹

Keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah ini telah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.²

¹ Dasyim Budimansyah, 2006, *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah* (Http: // www. Google. Com, diakses 1 Oktober 2007)

² Kepmendiknas SK No. 044/U/2002, *Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah* (Jakarta: Citra Umbara, 2002), hlm. 1

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.³

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 dinyatakan bahwa:

(1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan⁴

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat universal dan utama serta sebagai suatu keharusan bagi manusia/masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidupnya dimanapun dan kapanpun.⁵ Terutama pendidikan agama Islam yang lebih di tekankan dan akan di uraikan dalam penelitian ini. Di Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan seluruh warga negara, maka pengembangannya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di antaranya adanya kebijakan pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep baru ini cenderung disambut dan

³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 89-90

⁴ Undang-Undang Replubik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 6

⁵ Djumransjah, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Malang: bayu Media, 2004), hlm. 154

diapresiasi sebagai sebuah angin segar dalam proses perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan partisipasi masyarakat.

Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan, salah satunya upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui dewan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU RI No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah/masyarakat.

Menurut Sanapiah Faisal (1981) hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (1) sekolah sebagai partner dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya.⁶ Untuk itu, sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

⁶ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 148

Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, melainkan juga Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stake holder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep Partisipasi Berbasis Masyarakat (*community based participation*) dan Manajemen Berbasis Sekolah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stake holder* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stake holder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Masalah yang terjadi di lapangan, kehadiran komite sekolah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orangtua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah di tiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka. Pemberlakuan manajemen berbasis sekolah membawa implikasi kepada sekolah tidak menjadi subordinat lagi dari pemerintah maupun yayasan, tetapi bersifat otonomi. Pendekatannya pun tidak birokratis lagi, melainkan profesional. Ruang gerak para guru dan kepala sekolah menjadi lebih luas dan leluasa, termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolah.⁷

⁷ Mardiyono, *Menyoal Peran Komite Sekolah* ([http:// www. Google. Com](http://www.Google.Com), diakses 1 Oktober 2007)

Menurut Warsholin (2007), dalam proses pembentukan beberapa dewan pendidikan dan komite sekolah memang ada yang sudah sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada, bahkan ada yang perkembangannya melaju pesat sedemikian rupa dengan kreasi dan inovasinya yang membanggakan sehingga dewan pendidikan dan komite sekolah tersebut telah benar-benar dirasakan peran dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun justru perlu diakui bahwa masih banyak diantaranya yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada. Dengan menyadari adanya berbagai variasi tersebut, pada saat ini yang lebih penting adalah bukan lagi soal mendirikan atau membentuknya, tetapi bagaimana menggerakkan roda organisasi dan manajemen badan yang mandiri ini, agar dewan pendidikan dan komite sekolah yang ada segera melaksanakan kegiatan dalam mengemban peran dan fungsinya seperti yang diharapkan⁸

Hasil penelitian Warsholin dari tesisnya yang berjudul *Penilaian Mandiri (Self Assessment) Kinerja Komite Sekolah di MTs Gresik (Studi Kasus pada MTs Negeri dan MTs Yasmu)* menunjukkan bahwa, (1) Tingkat keberhasilan kinerja komite sekolah di MTs Yasmu dapat disimpulkan berhasil, yakni dengan nilai rata-rata 72,78 yang berada pada interval 70 – 89. Sedangkan nilai akhir yang didapat pada paparan data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja komite sekolah di MTs Negeri dapat disimpulkan kurang berhasil, yakni dengan nilai rata-rata 65,74 yang berada pada interval 50 – 69, (2) peran komite sekolah MTs. Yasmu lebih baik dari pada komite sekolah MTs Negeri, dan (3) Keberhasilan SDM dan fasilitas komite sekolah MTs Negeri lebih memadai dari pada MTs Yasmu.⁹

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan agama Islam yang semakin meningkat dewasa ini, maka dalam era manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pengelolaan pendidikan perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan,

⁸ Warsolin, *Penilaian Mandiri (Self Assessment) Kinerja Komite Sekolah di MTs Gresik (Studi Kasus pada MTSN dan MTS Yasmu)* (Tesis Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hlm. 2

⁹ *Ibid.*, hlm. 92

komitmen, kesadaran, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan "Masyarakat Sekolah" yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.

MBS adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah.¹⁰

Berikut ini beberapa masalah yang menyebabkan peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam belum berjalan secara maksimal, serta beberapa masalah yang menjadi sebab-sebab mengapa otonomi pendidikan sangat penting dan perlu:

1. Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah.
2. Pengguna sumber daya tidak optimal, rendahnya anggaran pendidikan merupakan kendala yang besar.
3. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan rendah.
4. Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya, Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan.¹¹

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, sekolah harus bisa membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan

¹⁰ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 33

¹¹ Sukron, *Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN Semarang* ([http://www. Google. Com](http://www.Google.Com), di akses 1 Oktober 2007)

keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.¹² Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan komite sekolah di setiap satuan pendidikan.

Dengan uraian di atas maka dalam penelitian ini mengkaji “*Upaya Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang*”.

B. Rumusan Masalah

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap secara menyeluruh dan komprehensif semua aspek yang terkait tentang upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, dengan mengambil kasus yang terjadi di SMP Negeri 1 Malang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang?
2. Upaya apa yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang?
3. Apakah kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang?

¹² Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 93

C. Tujuan Penelitian

Memperoleh gambaran secara mendalam tentang upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang meliputi:

1. Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang.
2. Upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang.
3. Kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang berupa upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang akan bermanfaat bagi para penyelenggaraan pendidikan (kepala sekolah), departemen Pendidikan dan Kebudayaan, para pengurus komite sekolah, serta para *stake holder* pendidikan terutama untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
 - b) Peneliti dapat menyumbangkan gagasannya yang berkaitan dengan upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
 - c) Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi pengurus komite sekolah

Mengungkapkan beberapa kendala atau hambatan terhadap peran komite sekolah yang pada akhirnya dapat digunakan oleh pengurus komite sekolah sebagai tataran pelaksanaan di lapangan, serta keberadaannya yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan agama Islam.

b) Bagi penyelenggara pendidikan

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi penyelenggara pendidikan akan pentingnya peran komite sekolah yang berguna dalam upaya peningkatan komitmen dan profesionalisme dalam mewujudkan "Masyarakat Sekolah" yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam.

c) Bagi Dinas Pendidikan Nasional

Membentuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjelaskan berbagai isu terhadap pembentukan komite sekolah hanya sekedar merubah nama dari BP3 sekaligus memberi masukan yang penting bagi para pemerhati pendidikan untuk lebih memiliki integritas yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pokok permasalahan yang diteliti tidak melebar dari apa yang telah ditentukan semula, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada masalah tertentu.

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komite sekolah keberadaannya berperan dan berfungsi sebagai berikut:

- a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentu dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, fungsinya dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program, dan pengadaan sumber daya pendidikan.
- b) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, fungsinya dalam hal sumber daya, sarana dan prasarana, dan anggaran.
- c) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, fungsinya dalam hal kontrol terhadap perencanaan sekolah, kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah, dan kontrol terhadap *output* pendidikan.
- d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat (*mediator agency*) di satuan pendidikan, fungsinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan program dan sumber daya.¹³

Dengan memberdayakan dan meningkatkan peran dan fungsinya, maka komite sekolah dapat berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan inti dari maksud dibentuknya komite sekolah. Maka fokus dari penelitian ini adalah dalam peran dan fungsi dari komite sekolah itu sendiri.

2. Dalam mutu pendidikan agama Islam ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya:
 - a) *Input*,
 - b) Proses, dan
 - c) *Output*.

¹³ Hasbullah, *op. cit.*, Hlm. 92-93

Menurut Choirul Fuad (2006), komponen *input* mencakup (siswa, guru, kepala madrasah, pegawai, dana, sarana prasarana, kurikulum, peran orang tua, peran masyarakat dan peran pemerintah), komponen proses mencakup (program madrasah, pengelolaan lembaga, pembelajaran kemandirian, kepemimpinan, komite sekolah, budaya organisasi dan akuntabilitas) dan komponen *output* mencakup (prestasi akademik dan non akademik)¹⁴

Dalam penelitian ini, difokuskan pada upaya yang dilakukan komite sekolah dalam segi keuangan, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan dan hubungan masyarakat, untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam yang meliputi prestasi akademik pendidikan agama Islam dan non-akademik yaitu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.

F. Definisi Operasional

Supaya terjadi kesatuan persepsi mengenai istilah yang digunakan terutama dalam membahas penelitian ini, maka penulis memberikan identifikasi pengertian sebagai berikut:

1. Komite sekolah

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan¹⁵

2. Mutu

Dalam konteks umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangibile*. Sedangkan dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada *proses pendidikan*

¹⁴ Choirul Fuad Yusuf, dkk. *Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan* (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2006), hlm. 12-13

¹⁵ Undang-Undang Replublik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *op. cit.*, hlm. 6

dan *hasil pendidikan*. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai *input*, seperti; bahan ajar, metodologi, sarana prasarana sekolah, dukungan administrasi, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.¹⁶

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang¹⁷

Adapun yang dimaksud mutu pendidikan agama Islam dalam penelitian ini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan memahami dan merealisasikan pendidikan agama Islam seoptimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika laporan ini memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam enam bab yang disusun secara sistematis. Pendahuluan penulis letakkan pada bab pertama yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (<http://www.Google.Com>, di akses 11 April 2008)

¹⁷ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7-8

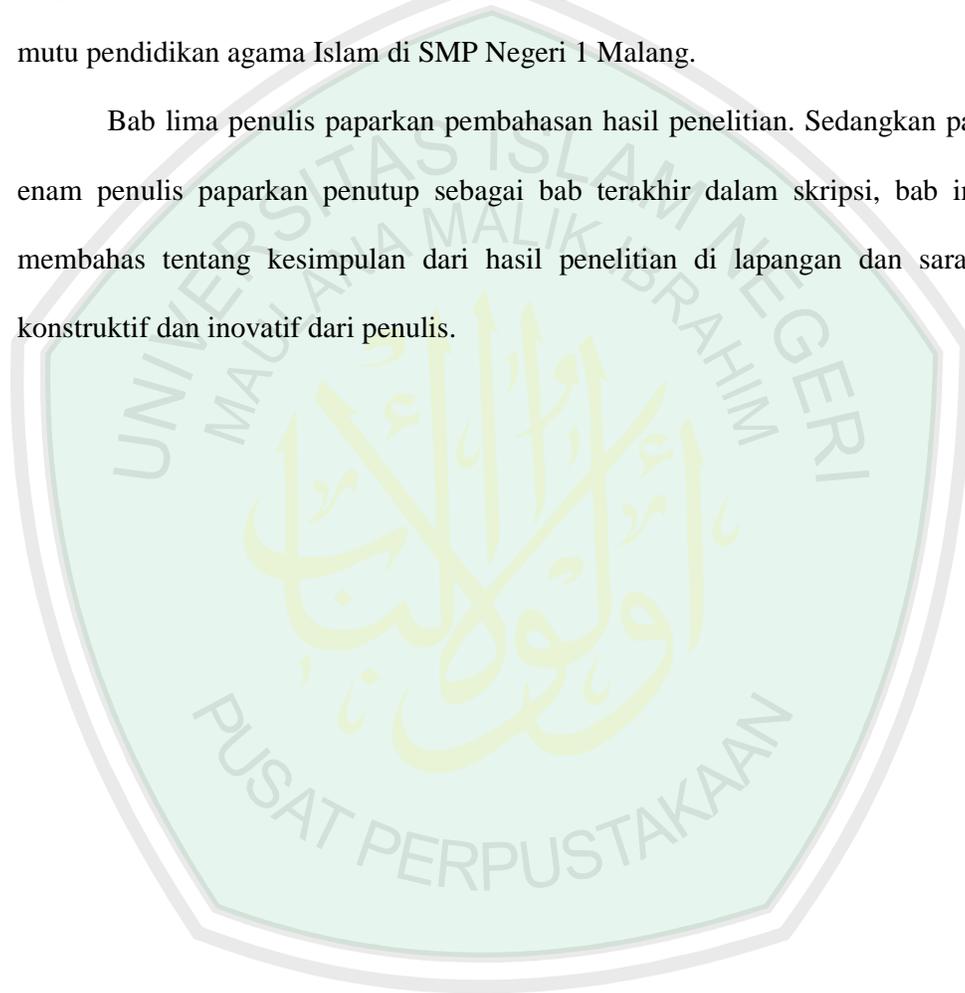
Kajian pustaka penulis letakkan pada bab dua yang membahas tentang landasan teori yang terdiri dari empat sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama memahami tentang komite sekolah yang terdiri dari: pengertian komite sekolah, tujuan komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah, organisasi komite sekolah, dan pelaksanaan komite sekolah. Sub pokok bahasan yang kedua tentang mutu pendidikan agama Islam yang terdiri dari: pengertian mutu pendidikan agama Islam, indikator mutu pendidikan agama Islam, karakteristik mutu pendidikan agama Islam, dan prinsip-prinsip mutu pendidikan agama Islam. Sub pokok bahasan yang ketiga mengenai upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Dan sub pokok bahasan yang keempat mengenai kendala-kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

Metode penelitian penulis letakkan pada bab tiga yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data yang meliputi: metode wawancara, metode observasi, dan metode studi dokumentasi, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Pada bab empat dipaparkan hasil penelitian yang penulis laksanakan yang meliputi dua sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan yang pertama penulis membahas tentang latar belakang obyek penelitian yang meliputi: sejarah berdiri dan berkembangnya SMP Negeri 1 Malang, visi dan misi SMP Negeri 1 Malang, sejarah berdirinya komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang, struktur organisasi sekolah dan komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang, keadaan guru di SMP Negeri 1 Malang, keadaan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Malang, keadaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Malang, dan prestasi akademik dan non akademik SMP Negeri 1 Malang.

Sedangkan sub pokok bahasan yang kedua penulis membahas tentang paparan data yang terdiri dari: mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang, upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang dan kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang.

Bab lima penulis paparkan pembahasan hasil penelitian. Sedangkan pada bab enam penulis paparkan penutup sebagai bab terakhir dalam skripsi, bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan dan saran-saran konstruktif dan inovatif dari penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Komite Sekolah

Keselarasannya antara kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dengan tuntutan perkembangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan serta hasil pendidikan menuntut adanya perubahan manajemen sekolah menjadi manajemen yang dilandasi kesepakatan, komitmen dan kesadaran membangun budaya baru dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah dan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel.

Untuk mewujudkan masyarakat sekolah sesuai dengan manajemen berbasis sekolah, maka *stake holder* pendidikan sebagai pihak yang terkait dengan proses pendidikan yaitu wali murid, masyarakat dan pihak sekolah harus saling bekerja sama, memiliki beban dan tanggung jawab yang seimbang dan proporsional dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan proses pembelajaran serta pengajaran untuk meningkatkan mutu sekolah.

Supaya tidak menjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab diantara *stake holder* pendidikan, maka diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, transparan yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk memwadahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan proporsional antara sekolah, wali murid dan masyarakat serta *stake holder* lainnya, maka untuk itu dibentuklah komite sekolah.

1. Pengertian Komite Sekolah

Pada tahun 2002 Mendiknas RI mengesahkan Kepmendiknas 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang merupakan kebijakan yang resmi sebagai bagian dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Kebijakan ini mengikat secara umum baik untuk sekolah negeri, swasta, umum dan madrasah, termasuk institusi penyelenggara pendidikan non formal.

Komite sekolah merupakan institusi baru dalam ranah Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Kelahiran institusi ini merupakan wujud nyata dari serangkaian agenda besar otonomi daerah di bidang penyelenggaraan layanan pendidikan.

Komite sekolah adalah sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah. Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus untuk SLTA). Anggota komite juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan orang dan jumlahnya harus gasal. Anggota komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah biasanya ditetapkan dalam AD/ART.¹⁸ Sebelum dibentuk komite sekolah, dikenal adanya Badan Pembantu

¹⁸ Muh. Arief Effendi, *Pemberdayaan Komite Sekolah* ([http://www. Google. Com](http://www.Google.Com)). Di akses 11 April 2008

Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG).

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stake holder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.¹⁹

2. Tujuan Komite Sekolah

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.²⁰

Menurut Sukirno (2006), pada bab III pasal 8 telah dijelaskan bahwa dibentuknya komite sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite sekolah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah yang bersangkutan²¹

¹⁹ Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, *Dewan Pendidikan & Komite Sekolah* ([http://www. Google. Com. pakguruonline. pendidikan. net](http://www.Google.Com.pakguruonline.pendidikan.net). Di akses 22 April 2008)

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah* (Jogjakarta: Pustaka Widiyatama, 2006), hlm. 3

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan,
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan²²

Keberadaan komite sekolah/madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.²³

3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

²² Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 90

²³ Khaeruddin, dkk. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet. II, 2007), hlm. 250

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- c. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan²⁴

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan di atas. Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:

- a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d. mediator antara pemerintah (*executive*) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.²⁵

Peran serta masyarakat sekolah melalui komite sekolah ditegaskan oleh Satori (2005:7) harus pula diarahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam pengelolaan sekolah, yaitu mencakup:

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *op. cit.*, hlm. 105

²⁵ Khaeruddin, dkk. *op. cit.*, hlm. 250-251

- a. Komite sekolah merupakan partner sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah itu,
- b. Pengembangan Perencanaan Strategik Sekolah dengan merumuskan program-program prioritas sekolah, sasaran pengembangan sekolah, strategik pencapaian sasaran, pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran pengembangan sekolah,
- c. Pengembangan Perencanaan Tahunan Sekolah. Perencanaan Tahunan Sekolah ini disusun bersama komite sekolah,
- d. Melakukan *monitoring* internal dan evaluasi diri (*internal monitoring* dan *self assesment*) secara regular, serta melaporkan dan membahas hasilnya dalam forum komite sekolah,
- e. Menyusun Laporan Tahunan Sekolah yang menggambarkan pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah. Laporan Tahunan Sekolah dibahas dalam forum dan harus mendapat penerimaan komite sekolah,
- f. Melakukan *review* sekolah. kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi obyektif masing-masing sekolah dalam satu wilayah pembinaan,
- g. Melakukan *survey* pendapat sekolah terhadap *stake holder* sekolah. hasil *survey* ini menggambarkan posisi pendapat dan kepuasan pada *stake holder* mengenai apa yang telah dianggap baik dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki,
- h. Menyelenggarakan “hari terbuka” (*open day*) bagi orang tua dan masyarakat, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan internal sekolah, dan

- i. Memantau kinerja sekolah yang meliputi kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar-mengajar, termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar peserta didik, disiplin dan tata tertib, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun ekstra kurikuler.²⁶

Sementara itu, untuk menjalankan perannya, komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - 4) kriteria tenaga pendidikan;
 - 5) kriteria fasilitas pendidikan;
 - 6) hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

²⁶ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2007), hlm. 243-244

- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.²⁷

Komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stake holder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.²⁸

Secara lebih rinci, Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (2004) melukiskan beberapa indikator dari peran komite sekolah sebagai berikut:

TABEL I: INDIKATOR PERAN KOMITE SEKOLAH

<i>Peran Komite Sekolah</i>	<i>Fungsi Manajemen</i>	<i>Indikator Kinerja</i>
Sebagai badan pertimbangan (<i>Advisory Agency</i>)	1. Perencanaan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat; • Memberikan masukan RAPBS; • Menyelenggarakan rapat RAPBS; • Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS; • Ikut mensahkan RAPBS bersama kepala sekolah.

²⁷ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 93-94

²⁸ Khaeruddin, *dkk. op. cit.*, hlm. 252

	2. Pelaksanaan Program a. Kurikulum b. PBM c. Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah; • Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru.
	3. Pengadaan Sumber Daya Pendidikan (SDM, S/P, Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat; • Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat di perbantukan di sekolah; • Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di sekolah; • Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.
Sebagai badan pendukung (<i>Supporting Agency</i>)	1. Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah; • Mobilisasi guru sukarelawan di sekolah; • Mobilisasi tenaga kependidikan non-guru di sekolah; • Memantau kondisi sarana dan prasarana di sekolah.
	2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana di sekolah; • Koordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah; • Evaluasi pelaksanaan dukungan.
	3. Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah; • Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah; • Koordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah; • Evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.
Sebagai Badan Pengontrol (<i>controlling</i>)	1. Kontrol terhadap perencanaan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah; • Penilaian terhadap kualitas kebijakan di sekolah; • Pengawasan terhadap proses perencanaan sekolah; • Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah; • Pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

	2. Kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap organisasi sekolah; • Pengawasan terhadap penjadwalan program sekolah; • Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah; • Pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program sekolah; • Pengawasan terhadap partisipasi sekolah terhadap program sekolah.
	3. Kontrol terhadap <i>output</i> pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian terhadap hasil Ujian Nasional; • Penilaian terhadap angka partisipasi sekolah; • Penilaian terhadap angka mengulang sekolah; • Penilaian terhadap angka bertahan di sekolah.
<i>Mediator Agency</i>	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi penghubung antara KS dengan masyarakat, KS dengan Dewan Pendidikan, serta KS dengan sekolah; • Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat; • Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah.
	2. Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kebijakan dan program pendidikan sekolah terhadap masyarakat; • Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap sekolah; • Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan; • Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah.
	3. Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kondisi sumber daya di sekolah; • Identifikasi sumber daya masyarakat; • Mobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah; • Koordinasi bantuan masyarakat.²⁹

²⁹ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 96-99

4. Organisasi Komite Sekolah

a. Keanggotaan

Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Disamping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota komite sekolah tersebut dibentuk dengan ketentuan unsur tertentu, misalnya:

- 1) Unsur masyarakat yang berasal dari orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah wakil peserta didik,
- 2) Unsur dewan guru paling banyak 15% dari jumlah anggota komite sekolah,
- 3) Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan,
- 4) Badan Pertimbangan Desa dan lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah,
- 5) Perwakilan dari organisasi siswa.³⁰

Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya harus ganjil. Syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).³¹

³⁰ Khaeruddin, dkk. *op. cit.*, hlm. 252

³¹ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 100

b. Kepengurusan

Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada. Selain itu, dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi.³²

Pengurus komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari kepala sekolah. Yang menangani urusan administrasi komite sekolah sebaiknya juga bukan pegawai sekolah.

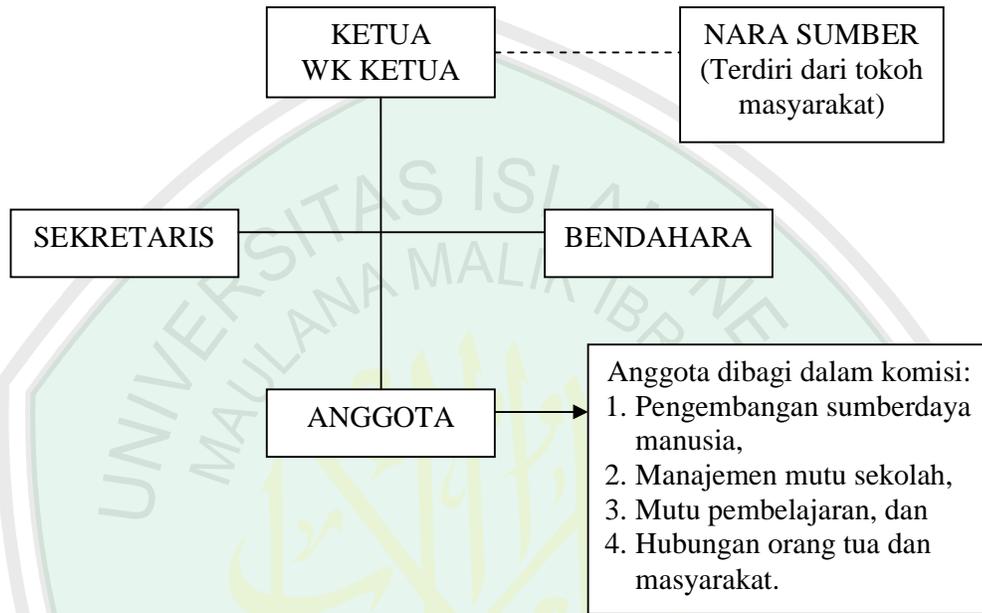
Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.
- 2) Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah.
- 3) Jika diperlukan komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.³³

³² *Ibid.*, hlm. 100

³³ Khaeruddin, dkk. *op. cit.*, hlm 253

Struktur organisasi komite sekolah yang sudah dibentuk di tiap-tiap sekolah pada umumnya sebagaimana dideskripsikan pada gambar I.



GAMBAR I: STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH

Ket. — Struktur Instrukturif
 ----- Struktur Konstruktif

Agar tidak tumpang tindih kewenangan dan bentuk partisipasi masing-masing, perlu dibuat aturan mengenai struktur organisasi dan kapan komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan kapan pula harus menjaga jarak. Besarnya peran orang tua dan masyarakat partisipasi melalui badan ini dalam mengelola

sekolah implementasinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan berjalan menurut selera orang-orang yang berada di dalam badan tersebut.³⁴

5. Pelaksanaan Komite Sekolah

Komite sekolah secara legal mulai digulirkan sejak 2 April 2002 meski fungsinya bisa saja secara spesifik lokal telah ada yang menjalankan jauh sebelumnya. Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung di dalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait, di mana posisinya dan apa manfaatnya.

Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, Dinas Pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya.³⁵

Masalah di negara Indonesia saat ini adalah bagaimana menerapkan mekanisme layanan pengaduan masyarakat secara sinergis ke dalam sistem kebijakan lokal. Keluhan masyarakat tidak menemukan jalur penyampaiannya, tidak melihat ditindaklanjuti ke arah perbaikan terhadap apa yang salah. Di sini diperlukan komitmen berbagai pihak terkait, terutama penyelenggara pendidikan, yang memerlukan perubahan pola berpikir, yang pada gilirannya akan mengubah perilaku.

Kalau pihak terkait merasa suatu perbaikan sebagai koreksi sangat diperlukan melalui masukan dan umpan balik dari masyarakat, maka mekanisme

³⁴ Syaiful Sagala, *op. cit.*, hlm. 240

³⁵ Soenarjo Soejoso, *Komite Sekolah Perlu Proses Bertahap dan Komitmen Jangka Panjang* ([Http:// www. Google. Com. Kompas](http://www.Google.Com.Kompas), di akses 1 Oktober 2007)

layanan pengaduan masyarakat itu akan dijalankan. Sebaliknya, apabila pihak terkait merasa apa yang dilakukannya saat ini paling nyaman dan tidak mau berubah, maka masukan berbagai pihak tidak menemukan jalan ke arah suatu perubahan.

Pelaksanaan transformasi konsep komite sekolah memerlukan proses bertahap dari waktu ke waktu, mulai dari tingkat menyadarkan perlunya fungsi komite sekolah baik kepada masyarakat maupun penyelenggara pendidikan sebagai peluang partisipasi masyarakat di bidang pendidikan; tingkatan berikutnya menyebarluaskan konsep pelibatan publik dalam komite sekolah kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan; berikutnya adalah penyelenggara pendidikan melakukan konsultasi ke masyarakat untuk mendapat masukan dalam proses menetapkan kebijakannya; kerja sama segenap potensi yang ada di masyarakat secara sinergis dalam bentuk saran dengan penyelenggara pendidikan memutuskan kebijakan; dan pada tingkat tertinggi adalah tercapainya rasa saling memiliki bahwa komite sekolah sebagai wadah pemecahan masalah bersama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.³⁶

Pada tingkat tertinggi ini masyarakat ikut memutuskan dan memecahkan masalah tanpa ada peran oposisi. Risiko ini menempatkan perlunya kematangan kondisi internal penyelenggara pendidikan, perubahan tatanan dalam pola berpikirnya, mengedepankan demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, di samping prinsip lainnya yang harus dilaksanakan secara komprehensif. Setiap pihak terkait sangat diperlukan perannya sesuai dengan kewenangan yang telah

³⁶ *Ibid.*

didelegasikan kepadanya, tanggungjawab yang telah ditugaskan kepadanya, dan akuntabilitas yang melekat pada diri masing-masing.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah memerlukan pelaksanaan prinsip keterbukaan, demokratis, tercapainya hasil guna dan daya guna, cepat, tanggap, partisipasi, berwawasan ke depan, penegakan hukum, akuntabilitas (pertanggungjawaban), keadilan, dan profesionalisme. Tidak bisa kesepuluh prinsip tadi dijalankan sebagian saja menurut keinginan masing-masing dan meninggalkan beberapa prinsip lainnya. Apabila penyelenggara pendidikan menyisihkan beberapa prinsip tersebut, maka akan timbul ketidakseimbangan pelayanan oleh penyelenggara dan keinginan masyarakat.

Identifikasi komitmen penyelenggara pendidikan sebagai titik awal pelaksanaan fungsi komite sekolah sangat penting diketahui terlebih dahulu, secara bertahap sedikit demi sedikit menyadarkan berbagai pihak terkait membangun penyelenggaraan pendidikan yang baik secara teratur, terus-menerus, berkesinambungan, dan sistematis³⁷

Masalahnya adalah sistematisa wawasan ke masa depan dalam jangka panjang dari penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan ini belum bisa memberikan dukungan fasilitasi dan mediasi ke arah perubahan pola pikir dan cara bertindak sehari-hari dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat lokal dan akar rumput. Wawasan merupakan citra pola pikir tentang masa depan yang ingin dicapai yang lebih baik dan lebih bermanfaat apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang.

Dengan demikian akan terjadi dinamika perubahan pola pikir dan cara bertindak dari waktu ke waktu berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan

³⁷ Hasbullah, *op. cit.*, hlm.103-104

pendidikan. Tentu saja ini akan menimbulkan dialog internal di masing-masing individu penyelenggara pendidikan.³⁸

Dalam desentralisasi pendidikan ke depan, melalui paradigma MBS, sekolah-sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan sendiri-sendiri asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan oleh pusat.

Dalam keadaan seperti itu, maka komite sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. Komite sekolah bisa ikut serta untuk meneliti berbagai permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara berkelompok maupun secara individual sehingga dapat membantu guru-guru untuk menerapkan pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya.³⁹

Dalam era demokratisasi dan partisipasi, akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi harus lebih banyak pada masyarakat sebagai *stake holder* pendidikan. Komite sekolah dapat menyampaikan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 104

³⁹ Hamzah B. Uno, *op. cit.*, hlm. 95

ketidakpuasan para orang tua murid akan rendahnya prestasi yang dicapai oleh suatu sekolah. Komite sekolah tidak perlu melaksanakan kegiatan studi atau penilaian pendidikan, tetapi cukup dengan menggunakan data-data yang tersedia atau hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebagai bahan untuk menyampaikan kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan atau sekolah.⁴⁰

Peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi tersebut. Ketika ada keluhan masyarakat yang masuk, ada keengganan memanfaatkannya sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Pada tingkat apa dan dengan cara bagaimana dialog publik, maka di sinilah posisi dan peran komite sekolah yang perlu dikenalkan manfaatnya.

Komite sekolah berhadapan dengan realitas adanya jalan yang panjang yang harus ditempuh secara bertahap. Kondisi demikian memerlukan komitmen dan dukungan fasilitas yang konsisten dan berkesinambungan. Pihak-pihak terkait perlu mengukur dari waktu ke waktu dan ditindaklanjuti dengan proses yang serasi pada kondisi lokalnya, seperti apa yang sudah berhasil dicapai, apa yang masih kurang, dan apa prospek ke depan dari keberadaan fungsi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan komite sekolah di samping benar-benar diperlukan, juga diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 96

⁴¹ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 104-106

B. Mutu Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Mutu Pendidikan Agama Islam

Secara etimologis, mutu adalah kadar, baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf/derajat, kepandaian atau kecerdasan.⁴² Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan.⁴³

Mutu pendidikan yaitu kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin⁴⁴

Disamping itu, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik itu di masa sekarang atau masa yang akan datang. Mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri akan tetapi terkait erat dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam mendefinisikan mutu pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dapat menghasilkan dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta mampu menanamkan dan

⁴² Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 732

⁴³ Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Bandung: CV. Cekas Grafika, 2003), hlm. 8

⁴⁴ Ace Suryadi, *Indikator mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Depdikbud, 1992), hlm. 159

menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari-hari.⁴⁵

Sebagaimana pengertian mutu pendidikan secara umum, mutu pendidikan agama Islam juga mempunyai pengertian yang sama. Hanya saja mutu pendidikan agama Islam memberikan penekanan yang lebih besar kepada kualitas muatan pendidikan agama Islam. Antara pendidikan umum yang berada di bawah pembinaan Depdikbud dan madrasah yang berada dibawah pembinaan Depag mempunyai banyak kesamaan dari pada perbedaannya. Oleh sebab itu, isu-isu dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di lingkungan Dikdasmen Depdikbud saat ini dan di masa depan -baik menyangkut aspek pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, maupun efisiensi dan efektivitas- pada umumnya banyak kesamaan dengan apa yang dihadapi oleh madrasah.

Isu tentang peningkatan mutu pendidikan agama Islam pada dasarnya sama baik di pendidikan umum maupun di madrasah. Oleh sebab itu, pendekatan untuk meningkatkan mutu pun tidak banyak berbeda. Kalau digunakan *input-proses-output*, akan tampak bahwa baik sekolah umum maupun madrasah sama-sama menghadapi pada persoalan ketiganya. Dalam aspek mutu, keluaran pendidikan dihadapkan pada disparatis mutu antar sekolah di lokasi yang berbeda-beda, antara sekolah negeri dan swasta, dan daya serap yang masih kurang terhadap materi kurikulum pada sebagian sekolah sebagaimana ditunjukkan oleh hasil-hasil Ebtanas.⁴⁶

⁴⁵ Muhaimin, *op. cit.*, hlm. 8

⁴⁶ Dedi Supriadi, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 142

Menurut Danim, hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler.⁴⁷ Disamping itu, mutu keluaran/*output* juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.

Dalam aspek proses, pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah masih dihadapkan pada masalah yang berkenaan dengan mutu proses belajar-mengajar yang belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian tujuan. Dalam hal ini, diakui bahwa metode-metode inovatif dalam proses belajar-mengajar belum sepenuhnya digunakan. Perlu dicatat bahwa mutu pendidikan di sekolah, khususnya proses belajar-mengajar di kelas bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan tergantung pada banyak masukan (*input*) yang meliputi masukan siswa, masukan instrumental, dan masukan lingkungan.⁴⁸ Hal-hal yang termasuk dalam kerangka mutu proses pendidikan ini adalah derajat kesehatan, keamanan, disiplin, keakraban, saling menghormati, kepuasan, dan lain-lain dari subyek selama memberikan dan menerima jasa layanan.⁴⁹

Dari segi masukan siswa, diketahui bahwa kecakapan siswa saat ini makin beragam dengan berlakunya wajib belajar. Hal ini menuntut sekolah untuk lebih

53-54 ⁴⁷ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen sekolah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.

⁴⁸ Dedi Supriadi, *op. cit.*, hlm. 142-143

⁴⁹ Sudarwan Danim, *op. cit.*, hlm. 53

responsif terhadap keadaan siswa yang beragam tersebut. Dari segi masukan instrumental, diperlukan adanya peningkatan jumlah maupun mutu masukan-masukan tersebut: guru yang cukup jumlahnya dan dengan mutu yang lebih baik, gedung yang memenuhi syarat, fasilitas belajar yang memadai, buku-buku yang cukup jumlahnya dan baik mutunya, dan banyak lagi. Dan dari segi masukan lingkungan, diakui bahwa sebagian sekolah di Indonesia belum menjadi lingkungan belajar yang kondusif, sementara dukungan dari masyarakat dan orang tua terhadap proses belajar siswa di sekolah belum begitu maksimal, yang berkaitan dengan tingkat apresiasi mereka terhadap pendidikan.⁵⁰

Mutu masukan menurut Danim dapat dilihat dari beberapa sisi:

- 1) Kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa;
- 2) Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah dan lain-lain;
- 3) Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja;

Mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.⁵¹

Tujuan peningkatan mutu pendidikan adalah mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keleluasaan dan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Tujuan peningkatan mutu pendidikan adalah pembentukan manusia seutuhnya bagi umat muslim, profil

⁵⁰ Dedi Supriadi, *loc. cit.*, hlm. 143

⁵¹ Sudarwan Danim, *op. cit.*, hlm. 53

manusia seutuhnya secara filosofis sesuai dengan petunjuk Allah SWT yaitu sosok insan *Ulil Albab* hal itu sesuai dengan surat Ali Imran ayat 190:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.*” (QS. Ali Imran: 190).⁵²

Sosok insan *Ulil Albab* mempunyai karakteristik, *pertama* beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, *kedua* memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga* memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan manusia, *keempat* selalu berpegang kepada petunjuk Allah karena takut azab neraka.⁵³ Jadi sosok insan *Ulil Albab* adalah sosok manusia seutuhnya karena ia memiliki nilai-nilai iman dan takwa (*afektif*), memiliki ilmu dan teknologi (*kognitif*), dan mampu mengamalkannya dalam kehidupannya (*psikomotorik*).

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mempunyai tujuan peserta didik yang dulunya belum kompeten dan menjadi manusia yang kompeten dalam segala bidang.

Dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam, ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

a. Keuangan

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas memerlukan tersedianya dana dan sarana yang lengkap dan canggih atau relevan dengan kebutuhan program-program yang ditangani. Namun dana yang banyak dan fasilitas yang lengkap dan mahal tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya pendidikan

⁵² *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 109

⁵³ Hari Sudrajat, *op. cit.*, hlm. 3

berkualitas, hal itu akan sangat tergantung pada sistem pengelolaan serta kemampuan atau keahlian dan moral para petugas yang bertanggung jawab.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.⁵⁴

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak.

Paling tidak ada tiga persoalan pokok dalam pembiayaan pendidikan, yaitu:

- 1) *Financing*, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh,
- 2) *Budgeting*, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan
- 3) *Accountability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan terutama tingkat menengah, sebab untuk pendidikan dasar berkenaan dengan adanya Wajib Belajar, yang semestinya pembiayaan dijamin pemerintah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk

⁵⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT. Rosda Karya, cet. X. 2006), hlm.

mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan, serta pengawasan penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan⁵⁵

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.⁵⁶

Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989:

bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua⁵⁷

Bagi sekolah yang berstatus negeri, sumber dana sekolah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Dana dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, meliputi gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas, dan;
- 2) Dana dari masyarakat, yang sekarang melalui komite sekolah, ada yang digali dari orang tua siswa maupun sumbangan-sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha, bahkan ada beberapa sekolah yang mampu membangun *networking* cukup bagus sehingga mendapatkan pembiayaan pendidikan yang cukup besar.⁵⁸

Dilihat dari sisi penggunaan, sumber biaya dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) biaya rutin, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun,

⁵⁵ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 122

⁵⁶ E. Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 48

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 48

⁵⁸ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 122-123

seperti: gaji, biaya operasional keseharian sekolah, dan (2) biaya pembangunan sekolah. seperti biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung dan lain sebagainya.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar-mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar-mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.⁵⁹

Dari pengertian di atas maka disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sekolah adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat yang merupakan penunjang untuk terselenggaranya proses pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan.

Masalah sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya cukup kompleks, namun demikian untuk telaah dapat ditelusuri dari berbagai sisi, yaitu dari segi jenis, proses, dan pemanfaatannya. Dari segi jenisnya, secara makro seluruh lingkungan fisik dalam suatu satuan pendidikan yang dirancang untuk memberikan fasilitas dalam proses pendidikan, seperti rancangan

⁵⁹ E. Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 49

halaman, tata letak gedung, taman, prasarana jalan, dan lain-lain, merupakan sarana prasarana pendidikan yang memerlukan pengelolaan yang baik. Sedangkan secara makro, terdapat tiga komponen sarana dan prasarana pendidikan yang secara langsung mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran, yaitu buku pelajaran dan perpustakaan, peralatan laboratorium beserta bahan praktiknya, dan peralatan pendidikan di dalam kelas.⁶⁰

Dilihat dari prosesnya, persoalan sarana dan prasarana berangkat dari desain, penyusunan naskah standarisasi spesifikasi, pengadaan atau pengadaan, distribusi, sampai pada penempatan dalam sekolah yang berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana.

Sedang ditinjau dari segi pemanfaatannya, terutama dalam konteks pembelajarannya, menurut Suharsimi (1979: 9) yang dikutip Hasbullah membedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) alat pelajaran, (2) alat peraga, dan (3) media pengajaran. Lebih jauh, Suharsimi (1979: 10) mengemukakan bahwa pada dasarnya sarana dan prasarana meliputi lima hal, yaitu:

- 1) Penentuan kebutuhan;
- 2) Proses pengadaan;
- 3) Pemakaian;
- 4) Pencatatan/pengurusan;
- 5) Pertanggungjawaban⁶¹

⁶⁰ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 119

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 119-120

c. Tenaga Kependidikan

Berhasil tidaknya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada jumlah atau kualitas para aktor atau petugas yang melaksanakannya. Mereka itu adalah civitas akademika; guru, pimpinan, seluruh tenaga kependidikan seperti pustakawan, petugas laboratorium, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya yang dimaksud tenaga kependidikan disini ialah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Oleh sebab itu, tenaga kependidikan di sekolah meliputi unsur guru (tenaga pengajar) dan unsur karyawan (tenaga administrasi). Secara lebih terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah.

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap pada kondisi menyenangkan.

Manajemen tenaga kependidikan mencakup; (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai.⁶² Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang

⁶² E. Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 42

diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.

Dilihat dari prosesnya, manajemen tenaga kependidikan mencakup mulai dari pengadaan, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, pemberhentian, dan penugasan, yang perlu dicermati untuk memperoleh sistem manajemen personel yang paling cocok dalam pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Persoalan manajemen personel lainnya menyangkut kriteria, pembentukan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan profesi, yang mungkin dalam satuan organisasi pendidikan terdiri dari berbagai ragam profesi.

Pada dasarnya sekolah bertanggung jawab dan harus terlihat dalam proses rekrutmen (penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf lainnya). Sementara itu, pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas dan kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam mengimplementasikan kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus-menerus atas inisiatif sekolah.⁶³

Birokrasi diluar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrument pendukung. Dalam konteks ini, pengembangan profesional harus menunjang peningkatan mutu dan penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangkan.⁶⁴ Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengontrol sumber daya manusia,

⁶³ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 113

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 113

fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk ketrampilan yang khas atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk mengikuti *training-training* tertentu ke instansi yang dianggap tepat demi pengembangan wawasan dan profesionalitasnya.

d. Hubungan Masyarakat

Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian penting dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Sekolah dengan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.

Menurut Griswold (1966) yang dikutip Hasbullah humas (*public relations*) merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan *policy* dan prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Di samping itu, Bonar (1977) mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dalam menjalankan usahanya untuk mencapai hubungan yang harmonis antara sesuatu badan organisasi dengan masyarakat sekelilingnya.⁶⁵

Dalam konteks pendidikan, Purwanto (1975) mengatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 124

dan jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat paedagogis, sosiologis, dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak.⁶⁶

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain:

- 1) Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak;
- 2) Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat;
- 3) Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah⁶⁷

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat, maka masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mesti berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mau tidak mau harus berhubungan dengan masyarakat. Baik dalam bentuk kapasitas hubungan dinas, maupun hubungan dan kerja sama dengan pihak lain di luar kedinasan. Dengan menggunakan sistem terbuka, satuan pendidikan sebagai organisasi tidak lagi dapat berdiri

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 124-123

⁶⁷ E. Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 50-51

sendiri, tetapi harus berinteraksi dengan organisasi lain baik dalam hubungan vertikal, horizontal, maupun fungsional.

Kegiatan humas pada dasarnya tidak cukup hanya menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah yang bersangkutan, tetapi juga harus mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan;
- 2) Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama;
- 3) Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan;
- 4) Menunjukkan pergantian keadaan pendapat umum.

Dengan demikian, pada dasarnya humas tidak hanya bersifat publisitas belaka, tetapi jauh dari itu bagaimana sekolah membangun kerja sama dengan pihak-pihak lain berupa *networking*, di mana kerja sama itu untuk kondisi sekarang merupakan sesuatu yang sangat vital dan penting dilakukan, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.⁶⁸

2. Indikator Mutu Pendidikan Agama Islam

Beberapa indikator yang menunjukkan ciri-ciri pendidikan agama Islam bermutu, antara lain:

- a. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
- b. Sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai;
- c. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat;
- d. Adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi;

⁶⁸ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 126

- e. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu;
- f. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid atau masyarakat⁶⁹

Menurut Suryadi dan Tilaar, indikator pendidikan yang bermutu adalah sebagai berikut:

- a. Faktor *input* yang meliputi:
 - 1) Besar kecilnya sekolah;
 - 2) Faktor guru yang berkualitas;
 - 3) Faktor buku belajar;
 - 4) Faktor situasi belajar yang kondusif;
 - 5) Kurikulum;
 - 6) Manajemen sekolah yang efektif.
- b. Faktor *output* yang meliputi:
 - 1) Partisipasi sekolah (dalam prestasi);
 - 2) Efisiensi internal proses belajar;
 - 3) Prestasi belajar kognitif;
 - 4) Prestasi belajar efektif⁷⁰

Adapun indikator pendidikan yang bermutu menurut tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN, yaitu pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berbudi luhur dan berkepribadian;
- c. Berdisiplin;
- d. Bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, dan mandiri;
- e. Cerdas dan terampil;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Rasa cinta yang dalam terhadap tanah air;
- h. Semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial yang tebal;
- i. Memiliki rasa percaya diri;
- j. Inovatif dan kreatif⁷¹

⁶⁹ Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan* (Malang: Jurnal Administrasi Pendidikan FKIP UM Press, 2000)

⁷⁰ Suryadi dan Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 34

⁷¹ Syafruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 87

3. Karakteristik Mutu Pendidikan Agama Islam

Pendidikan dikatakan bermutu apabila pendidikan itu mampu membentuk lulusannya agar memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai calon pemimpin di muka bumi ini. Karakteristik pendidikan bermutu terutama pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang menghasilkan lulusan yang meningkatkan daya belinya atau tingkat ekonominya dan juga tingkat kesehatannya;
- b. Pendidikan yang berfungsi mengembangkan watak dan peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Pendidikan yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, demokratis serta tanggung jawab.⁷²

Dalam peningkatan mutu pendidikan janganlah mengabaikan *input*, proses, dan *output*. Karena untuk mengukur apakah pendidikan itu bermutu atau tidak dapat di lihat dari ketiga hal tersebut. Pendidikan dikatakan bermutu apabila mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut: *pertama*, bisa menghasilkan *output* yang diharapkan sekolah. *Output* sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen sekolah.

Kedua, proses, sekolah yang bermutu mempunyai sejumlah karakteristik proses sebagai berikut:

- a. Proses belajar-mengajar yang efektifitasnya tinggi;
- b. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat;

⁷² Hari Sudrajat, *op. cit.*, hlm. 137

- c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
- d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif;
- e. Sekolah yang memiliki budaya mutu;
- f. Sekolah yang mempunyai *teamwork* yang kompak, cerdas, dan dinamis;
- g. Sekolah yang memiliki kewenangan dan kemandirian;
- h. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat;
- i. Sekolah yang memiliki keterbukaan (transparansi manajemen);
- j. Sekolah yang mempunyai kemampuan untuk berubah (psikologis dan fisik);
- k. Sekolah yang responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan;
- l. Sekolah yang memiliki akuntabilitas.

Ketiga, input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses.⁷³

Jika suatu sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten maka suatu sistem pendidikan itu dikatakan pendidikan yang bermutu.

4. Prinsip-prinsip Mutu Pendidikan Agama Islam

Mutu merupakan topik penting dalam pembicaraan tentang pendidikan saat ini. Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan, prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan dirancang untuk membantu para profesional pendidikan mengimplementasikan prinsip-prinsip

⁷³ Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001), hlm. 13-20

mutu di sekolah atau di wilayahnya masing-masing. Beberapa prinsip peningkatan mutu pendidikan termasuk pendidikan agama Islam diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa,
- b. Kesulitan yang dihadapi profesional pendidikan adalah ketidak mampuan mereka dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara ataupun proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada,
- c. Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan yang harus diubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas, para profesional pendidikan harus membentuk para siswa dengan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global,
- d. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, *teamwork*, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu,
- e. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan, jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pemimpin dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktifitas, dan

kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendidikan yang baru atau menggunakan model-model mengajar, membimbing dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah dan mengembangkan program baru,

- f. Banyak profesional dibidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan dalam mengantisipasi tuntutan-tuntutan,
- g. Program peningkatan mutu dalam bidang komersil tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan budaya, lingkungan dan proses kerja organisasi. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan,
- h. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat, dan
- i. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat

dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan, tidak dengan program-program singkat.⁷⁴

Edward Deming mengembangkan 14 prinsip yang menggambarkan apa yang dibutuhkan sekolah untuk mengembangkan budaya mutu, dengan mengkaitkan dalam proses kelangsungan hidup bisnis. Prinsip itu adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan konsisten tujuan, yaitu untuk memperbaiki layanan dan siswa dimaksudkan untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia;
- b. Mengadopsi filosofi mutu total, setiap orang harus mengikuti prinsip-prinsip mutu;
- c. Mengurangi kebutuhan pengajuan, mengurangi kebutuhan pengajuan yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu;
- d. Menilai bisnis sekolah dengan cara baru, nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan, pandang sekolah sebagai pemasok siswa, bekerja dengan orang tua siswa dan berbagai lembaga untuk memperbaiki mutu pendidikan;
- e. Memperbaiki mutu produktifitas serta mengurangi biaya, gambarkan proses memperbaiki, mengidentifikasi mata rantai kostumer,

⁷⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, dkk. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah* (Bandung: PT. Revika Adi Tama, 2006), hlm. 9-11

mengidentifikasi bidang perbaikan, implementasikan perubahan, nilai dan ukur hasilnya serta standarisasikan proses;

- f. Belajar sepanjang hayat, mutu diawali dan diakhiri dengan latihan. Bila anda mengharapkan orang mengubah cara bekerja mereka, anda mesti memberikan mereka perangkat yang diperlukan untuk mengubah proses kerja mereka;
- g. Kepemimpinan dalam pendidikan, merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan arahan serta mengajarkan dan mempraktikkan prinsip-prinsip mutu;
- h. Mengeliminasi rasa takut, hilangkan rasa takut dalam bekerja, ciptakan lingkungan yang akan mendorong orang untuk bebas berbicara. Dengan demikian setiap orang akan bekerja secara efektif untuk perbaikan sekolah;
- i. Mengeliminasi hambatan keberhasilan, manajemen bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya;
- j. Menciptakan budaya mutu, ciptakanlah budaya mutu yang mengembangkan tanggungjawab pada setiap orang;
- k. Perbaikan proses, tidak ada proses yang pernah sempurna, karena itu, carilah cara yang terbaik, proses terbaik, terapkan tanpa pandang bulu;
- l. Membantu siswa berhasil, hilangkanlah rintangan yang merampok hak siswa, guru, atau administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya;
- m. Komitmen, manajemen mesti memiliki terhadap budaya mutu;

- n. Tanggung jawab, biarkan setiap orang di sekolah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu.⁷⁵

C. Upaya Komite sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam

Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Agar komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Dalam era otonomi pendidikan ini, keluarga dan masyarakat bukan lagi pihak yang pasif yang hanya menerima keputusan- keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka harus aktif bermain, menentukan, membuat program bersama sekolah dan pemerintah. Orang tua hendaknya menyediakan waktu untuk berkunjung ke sekolah dan ke kelas guna mengontrol pendidikan anaknya.

⁷⁵ Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 85-89

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan, dan pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sementara salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (sekolah), khususnya pendidikan dasar dan menengah termasuk dalam pendidikan agama Islam. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan salah satunya adalah diterapkannya Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yaitu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.⁷⁶

Penerapan MPMBS memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam pengelolaan pendidikan, dan lembaga yang mewadahnya adalah dewan pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan komite sekolah yang berkedudukan di satuan pendidikan (sekolah). Munculnya kedua lembaga ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, strateginya antara lain:

1. Komitmen semua tenaga pendidikan dan kependidikan untuk sungguh-sungguh menunaikan kewajiban sebagai seorang guru, yang memiliki rasa

⁷⁶ Umaedi, *op. cit.*

tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas tinggi di dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidikan, pengajar dan pelatih,

2. Komitmen propinsi, kabupaten/kota untuk menganggarkan alokasi dana untuk sektor pendidikan 20 persen seperti amanat UU,
3. Komitmen semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, sekolah, orang tua, dan murid sendiri, untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Dan diwujudkan lembaga yang bernama komite sekolah,
4. Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka memberika otonomisasi kepada sekolah secara penuh,
5. Mengangkat tenaga guru,
6. Meningkatkan kualifikasi guru, di semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam baik melalui penyetaraan pendidikan, maupun berupa diklat-diklat. Apalagi PP Nomor 19/2005. dan UU Guru dan Dosen, guru-guru mulai dari Paud sampai pendidikan menengah minimal D-4 atau S-1,
7. Menciptakan iklim dan suasana kompetitif dan kooperatif antar sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah masing-masing,
8. Pengadaan infrastruktur sekolah, terutama berkenaan dengan penyediaan sarana pembelajaran, seperti: buku-buku wajib siswa/guru, laboratorium, pustaka, UKS, dan ruang belajar yang memadai,
9. Membenahi manajemen sekolah dan manajemen kelas, dan ini secara langsung akan berkaitan dengan mutu pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam,

10. Pemberdayaan fungsi dan peran pengawas sebagai ujung tombak pembinaan sekolah,
11. Pemberdayaan secara maksimal keberadaan komite sekolah sebagai mitra sekolah, dan
12. Tingkat kesejahteraan guru di semua jenjang dan jenis pendidik, sekolah umum dan agama, sekolah negeri, swasta. Solusi dari permasalahan pendidikan memang sudah ada dilakukan oleh Dinas Pendidikan, akan tetapi ini perlu terus digesa, sehingga pendidikan bermutu di negeri ini dapat terwujud.⁷⁷

Sedangkan menurut Satori (2001:8) kontribusi komite sekolah terhadap sekolah yang menyangkut kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan strategik sekolah, yaitu strategik pembangunan sekolah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan;
2. Penyusunan Perencanaan Tahunan Sekolah, yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategik sekolah;
3. Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah;
4. Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi *stake holder* sekolah;

⁷⁷ Aceh Forum, *Mewujudkan Pendidikan Bermutu* (<http://www.Google.Com.k4dOeT@gmail>. Diakses 22 April 2008)

5. Mendorong sekolah melakukan *internal monitoring*, evaluasi diri dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah;
6. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/intitansi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (*Quality Assurance*) serta memelihara kondisi pembelajaran di sekolah sesuai dengan tuntutan standar minimum kompetensi peserta didik (*Basic minimum competency*) seperti yang diatur dalam PP nomor 25 tahun 2000, UUSPN No. 20 tahun 2003, dan sejumlah PP yang menyertainya;
7. Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah.⁷⁸

Kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan agama Islam melalui komite sekolah adalah sangat tepat, mengingat selama ini pendidikan sulit mengharapkan dukungan dari anggaran pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Dewan pendidikan dan komite sekolah diharapkan suatu alternatif untuk memecahkan masalah pembiayaan pendidikan yang mana setiap tahunnya anggaran pendidikan tidak memadai bahkan terkesan tidak adil.

Komite sekolah dapat membantu kebutuhan sekolah akan anggaran, fasilitas yang masih kurang, mencarikan dana untuk menambah insentif guru, dengan melakukan pungutan dana tanpa memberatkan orang tua siswa dan kebutuhan lainnya. Anggaran ini dapat diperoleh dari upaya anggota komite sendiri melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pengusaha atau alumni sekolah.

Usaha yang bisa dilakukan komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu PAI adalah seperti: (1) ikut serta dalam pembentukan TPA; (2) meminta ijin

⁷⁸ Syaiful Sagala, *op. cit.*, hlm. 241

penggunaan masjid setempat untuk kelancaran pembelajaran PAI; (3) ikut serta mensukseskan pengajian muslimah rutin bulanan; (4) ikut serta mensukseskan proses pembelajaran secara umum; (5) menyampaikan keluhan kesah orang tua siswa/masyarakat mengenai tingkah laku, prestasi siswa kepada sekolah dan lain sebagainya.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat itu merupakan proses komunikasi yang harus dibangun dan dipelihara. Tujuan dari proses komunikasi itu adalah untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan-kebutuhan pendidikan di sekolah, kegiatan-kegiatan pendidikan, dan mendorong masyarakat secara bijaksana untuk berminat dan bekerja sama dalam memajukan rencana pendidikan di sekolah termasuk pendidikan agama Islam. Dengan demikian, kegiatan operasional pendidikan, kinerja dan produktifitas sekolah diharapkan semakin efektif dan efisien.

D. Kendala yang Dihadapi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan manajemen sekolah melalui penguatan lembaga komite sekolah. Dalam lembaga tersebut, diikutsertakan orang tua, guru, legislator, pengusaha dan setiap orang yang mempunyai kepentingan terhadap sekolah.

Sebenarnya keberadaan komite sekolah cukup penting jika komite sekolah berjalan dengan semestinya, karena komite sekolah bisa memberikan masukan dan mengoreksi kebijakan pihak sekolah dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Tetapi pada pelaksanaannya tidak semua komite sekolah itu dapat

diberdayakan dengan baik, hal itu disebabkan karena terdapat kendala yang belum bisa diselesaikan oleh komite sekolah.

Kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya terletak dalam hal teknik dan administrasi serta dalam diri pribadi masing-masing personil komite sekolah. Kendala dalam hal teknik dan administrasi meliputi: 1) kurangnya sarana dan prasarana, 2) tidak adanya dana karena kurangnya inisiatif dalam penggalan dana dari masyarakat, 3) struktur kepengurusan dan keanggotaan yang kurang berfungsi, dan 4) komunikasi antar personil komite sekolah yang kurang. Disamping itu kendala dalam diri pribadi masing-masing komite sekolah meliputi, 1) tingkat pengetahuan personil komite sekolah (dari unsur masyarakat) yang masih rendah, 2) tingkat perekonomian personil komite sekolah yang rata-rata berada dalam taraf menengah kebawah, dan 3) perbedaan tingkat pengetahuan dan tingkat perekonomian dalam personil komite sekolah sehingga membuat minder personil komite sekolah (dari unsur masyarakat).⁷⁹

Sementara kendala eksternalnya terletak pada orang tua siswa dan masyarakat serta dari sekolah. Kendala dari orang tua siswa dan masyarakat sekitar meliputi, 1) tingkat perekonomian masyarakat dan orang tua siswa yang masih rendah, 2) tingkat pengetahuan keagamaan dan pendidikan yang tergolong rendah, dan 3) asumsi masyarakat setempat yang masih berpandangan skeptis dan sangsi terhadap keberadaan komite sekolah. Kendala dari sekolah sebagai pihak dari pemerintah kurang begitu menggerakkan komite sekolah.⁸⁰

⁷⁹ Siti Komariyah, *Komite Sekolah Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam* (<http://www.Google.Com>. Di akses 22 April 2008)

⁸⁰ *Ibid.*

Melihat pentingnya pemberdayaan komite sekolah dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, maka kerja sama antara sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki demi tercapainya kemajuan pendidikan. Komite sekolah sebagai sebuah wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat memerlukan adanya komite sekolah, mengingat komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah yang memiliki peranan besar untuk kemajuan dan pengembangan sekolah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yakni “Upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang”. Maka pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Penelitian kualitatif menurut Boy dan Tailor (1975: 5) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸¹ Penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi.⁸²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Disebut penelitian deskriptif karena peneliti mengadakan penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala dan juga keadaan.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 4

⁸² *Ibid.*, hlm. 9-10

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti agar tidak menimbulkan kecurigaan maka perlu memberitahukan identitas dan status peneliti kepada informan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada pentingnya kehadiran peneliti dan keterlibatan peneliti. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain “peneliti berfungsi sebagai instrument kunci atau alat peneliti yang utama”. Lebih jauh Moleong (2001) mengungkapkan bahwa “peranan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, dan penganalisis, penafsir dan sekaligus sebagai pelapor penelitian”.⁸³

Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dan mengawasi obyek penelitian serta mengadakan wawancara langsung dengan kepala sekolah, pengurus dan anggota komite sekolah serta guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang sebagai subyek penelitian. Mereka mengetahui kehadiran peneliti selama proses penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan obyek kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah di SMP Negeri 1 Malang. Lokasi ini memungkinkan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan observasi karena letaknya yang strategis dan merupakan salah satu sekolah unggulan di kota Malang.

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan questioner atau wawancara dalam pengumpulannya, maka sumber data disebut responden yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, hlm. 56

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.107

Menurut Moleong responden atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁸⁵ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah orang-orang yang diprediksi mengetahui benar tentang komite sekolah antara lain:

1. Kepala dan wakil kepala SMP Negeri 1 Malang,
2. Pengurus komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang yang terdiri dari:
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris
 - c) Bendahara,
3. Anggota komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang yang meliputi: orang tua/wali murid, para tokoh masyarakat, anggota masyarakat, pakar pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan, perwakilan siswa, dan perwakilan forum alumni yang telah dewasa, yang diambil tiga orang saja,
4. Guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 1 Malang yang berjumlah dua orang.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data tidak lain merupakan suatu proses data primer untuk keperluan penelitian. Serta merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan maka perlu adanya teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara tepat sesuai dengan masalah yang

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 112

diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain:

1. Metode Wawancara

Metode ini merupakan metode untuk mencari data yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan responden atau sumber data. Cara ini dilakukan dengan cara komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁸⁶ Metode wawancara dipergunakan apabila seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Metode wawancara peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam dan langkah-langkah apa saja yang telah dilaksanakan oleh komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang dalam mencapai tujuan tersebut.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi struktur. Menurut Arikunto (2002) dalam teknik ini mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan keterangan yang mendalam.⁸⁷

⁶ Nasution, *Metode Research* (Bandung: Jemmars, 1991), hlm. 153

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 203

2. Metode Observasi

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan segala indera.⁸⁸

Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik pengamatan langsung yaitu peneliti secara langsung mengamati dan mencatat segala sesuatu yang diperlukan pada saat terjadinya proses untuk melihat secara visualisasi kegiatan komite sekolah dan *cross check* terhadap data tertulis. Misalkan data tentang kegiatan rapat kerja pengurus, kinerjanya dalam lingkup sekolah dan lain sebagainya.

Partisipasi peneliti di lapangan tergantung pada kebutuhan. Bisa dari partisipasi yang pasif mulai dari melihat-lihat lokasi penelitian, mendengarkan pendapat informan, memperhatikan perilaku informan, sampai pada partisipasi aktif seperti ikut serta dalam kinerja pengurus komite sekolah, mengikuti rapat kerja pengurus, dan lain-lain.

3. Metode Studi Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode studi dokumentasi, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸⁹

Metode studi dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang terkait dengan:

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 204

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 206

- a) Sejarah berdiri dan berkembangnya SMP Negeri 1 Malang
- b) Visi dan misi SMP Negeri 1 Malang
- c) Sejarah berdirinya komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang
- d) Struktur organisasi sekolah dan komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang
- e) Data guru dan siswa di SMP Negeri 1 Malang
- f) Sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Malang
- g) Dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Moleong adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha secara formal untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁹⁰

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami sehubungan kegiatan, pandangan, sikap yang tampak atau suatu proses yang sedang terjadi, kelainan yang muncul, kecenderungan, pertentangan dan sebagainya. Penggunaan teknik ini sesuai dengan sifat data yang dihasilkan dalam penelitian, yaitu data kualitatif atau data yang tidak diwujudkan dalam bentuk angka.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen, arsip-arsip dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan sumber data tertulis dan foto⁹¹

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 103

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 6

Sebelum mengadakan penelitian peneliti mengenal dan memahami kondisi komite sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya, secara resmi mengadakan observasi untuk mengumpulkan berbagai macam data. Setelah data terkumpul baik dari dokumentasi maupun wawancara kemudian ditafsirkan untuk memprediksi keberadaan lembaga tersebut. Misalnya, sewaktu memperoleh data tentang kinerja komite dalam sarana dan prasarana sekolah yang menunjukkan sekolah mengalami kemajuan. Penggunaan internet membuat siswa menjadi lebih cepat dalam memperoleh sumber belajar dan tidak ketinggalan informasi.

Selain itu peneliti juga membandingkan kondisi yang terjadi dengan UU RI dan pendapat para ahli sehingga akan mendapatkan/memperoleh kesimpulan tentang upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang.

Sesuai dengan jenis datanya, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu pengelolaan dengan langkah-langkah sebagai berikut: setelah data terkumpul selanjutnya diidentifikasi serta dikategorikan kemudian digambarkan berdasarkan logika dengan tidak melupakan hasil dari pengamatan, wawancara dan mengambil keputusan. Adapun tahap-tahap analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis selama pengumpulan data

Dalam analisis data ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Pembatasan mengenai jenis kajian yang diperoleh,
- b) Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan,
- c) Merencanakan tahapan-tahapan pengumpulan data dengan memperhatikan hasil pengamatan sebelumnya,
- d) Menulis catatan bagi diri sendiri mengenai hal yang dikaji.

2. Analisis setelah pengumpulan data

Adapun untuk membatasi data yang telah terkumpul adalah bahwa data yang diperoleh tidak direalisasikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk uraian atau gambaran tentang kondisi obyek penelitian yang berkenaan dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang lebih relevan dan urgen terhadap data yang telah terkumpul, maka peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu: mengadakan observasi secara terus-menerus (*persistent observation*) terhadap objek yang diteliti guna memahami gejala yang lebih mendalam terhadap upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau validitas data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di dunia nyata. Menurut Nasution (1991) untuk memperoleh keabsahan data, peneliti melakukan uji kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada validitas atau kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh.⁹² Kredibilitas data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya di lapangan.

Untuk memperoleh keabsahan data tersebut, maka teknik yang digunakan adalah:

1) *Triangulasi*

⁹² Nasution, *op. cit.*, hlm. 57

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.⁹³

Triangulasi merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya hasil observasi dapat di cek dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan antara beberapa data.

Dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 1987: 331).⁹⁴

2) Menggunakan bahan referensi

Penggunaan bahan referensi sangat membantu memudahkan peneliti dalam pengecekan keabsahan data, karena dari referensi yang ada sebagai pendukung dari observasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Menurut Eister (1975) kecukupan referensi sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan teknik untuk keperluan evaluasi.⁹⁵

3) Teknik *member check*

Menurut Lincolin (1993) teknik *member check* yaitu dengan mendatangi kembali informan sambil memperlihatkan data yang sudah diketik pada lembar catatan lapangan yang sudah disusun menjadi paparan data dan temuan penelitian. Serta dikonfirmasi pada informan apakah maksud

⁹³ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 178

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 178

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 181

informan itu sudah sesuai dengan apa yang ditulis atau belum. Intinya dalam *member check* informan dan peneliti mengadakan *review* terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian baik isi maupun bahasanya.⁹⁶

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tiga tahap, (1) pra lapangan, (2) kegiatan lapangan, (3) analisis intensif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor. Begitu juga Moleong mengemukakan bahwa suatu penelitian hendaknya dilakukan dalam tahap-tahap tertentu yaitu; *pertama*, mengetahui sesuatu yang perlu diketahui, tahap ini dinamakan tahap orientasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang tepat tentang latar belakang penelitian. *Kedua*, eksplorasi fokus, pada tahap ini mulai memasuki proses pengumpulan data yaitu cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Dan *ketiga*, adalah tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data.⁹⁷

Tahapan di atas akan diikuti oleh peneliti, *pertama* orientasi yaitu mengunjungi dan bertatap muka dengan ketua komite sekolah dengan melalui kepala sekolah. Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah (1) minta izin kepada lembaga setempat; (2) merancang usulan penelitian; (3) menentukan informan penelitian; (4) menyiapkan kelengkapan penelitian, (5) mendiskusikan rencana penelitian. *Kedua* eksplorasi, setelah mengadakan orientasi di atas kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dengan cara (1) wawancara; (2) mengkaji dokumen; (3) observasi. *Ketiga*, tahap pengecekan keabsahan data, pada tahap ini peneliti mengadakan pengecekan data pada subjek informasi atau dokumen untuk membuktikan validitas yang diperoleh.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 221

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 239-240

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya SMP Negeri 1 Malang

SMP Negeri 1 Malang dibangun mulai tahun 1927 dan selesai pada tahun 1929. pada waktu itu, bangunan tersebut mulai digunakan sebagai Sekolah Menengah Pertama di Malang. Karena masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, sekolah tersebut dijadikan rumah sakit sementara. Tetapi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946 sekolah itu menjadi SMP Peralihan (TRIP) sampai dengan tahun 1949 dengan kepala sekolah Bapak Koesnadi (1946-1949). Setelah itu, Bapak Koesnadi digantikan oleh Bapak Damadi sebagai kepala sekolah baru pada tahun 1950 sampai dengan 1954. pada tahun 1951 SMP Peralihan (TRIP) resmi menjadi SMP Negeri 1 Malang pada tanggal 23 Juli 1951 dengan SK Negeri No: 2106/BII.

Sejak berdiri sampai saat ini, SMP Negeri 1 Malang telah mengalami beberapa pergantian kepala sekolah. Secara berurutan pergantian kepala SMP Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Bpk. Safiudin | (Tahun 1955-1958) |
| b. Bpk. Wirai | (Tahun 1959-1960) |
| c. Bpk. Islan, BA | (Tahun 1960-1967) |
| d. Bpk. Drs. R.Soepadi | (Tahun 1968-1980) |
| e. Bpk. Drs. Soewandi | (Tahun 1980-1985) |
| f. Bpk. Drs. Slamet Sudarto | (Tahun 1985-1989) |

- g. Bpk. Djari Slamet (Tahun 1989-1992)
- h. Bpk. Drs. Soemarto (Tahun 1992-1995)
- i. Bpk. Drs. Soetjipto (Tahun 1995-2002)
- j. Bpk. Drs. Muklis (Tahun 2002-2004)
- k. Bpk. Drs. Soeprianto, M.Pd (Tahun 2004-2004)
(Sebagai pejabat sementara Kepala Sekolah)
- l. Bpk. Drs. Burhanuddin, M.Pd (Tahun 2004-sekarang)
Sumber: Dokumen SMP Negeri 1 Malang, Tahun Ajaran 2007/2008

2. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Malang

a. Visi

Unggul berlandaskan budi pekerti luhur yang berwawasan lingkungan.

Indikator Visi:

- 1) Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik baik nasional maupun internasional
- 2) Unggul dalam penggunaan teknologi berbasis ICT
- 3) Unggul dalam budi pekerti luhur berlandaskan iman dan taqwa
- 4) Unggul dalam manajemen pendidikan bertaraf internasional

b. Misi

- 1) Mewujudkan tercapainya prestasi yang unggul baik akademik maupun non akademik baik nasional maupun internasional
- 2) Mewujudkan tercapainya penggunaan teknologi berbasis ICT
- 3) Mewujudkan tercapainya sikap budi pekerti yang luhur didasari iman dan taqwa
- 4) Mewujudkan tercapainya sistem manajemen pendidikan bertaraf

Internasional

Sumber: Dokumen SMP Negeri 1 Malang, Tahun Ajaran 2007/2008

3. Sejarah Berdirinya Komite Sekolah Di SMP Negeri 1 Malang

Seiring dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor UU. 044/U/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan komite sekolah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Maka pada tahun 2003 dalam rangka menghadapi, menanggapi dan menanggapi perubahan baru ini, menjadi alasan SMP Negeri 1 Malang membentuk dan memberdayakan komite sekolah yang diterbitkan oleh Diknas Tahun 2003. Akan tetapi struktur organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan SMP Negeri 1 Malang.

Komite sekolah merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya komite sekolah tidak jauh berbeda dengan BP3 yang ada di setiap satuan pendidikan. Hal yang membedakannya adalah komite sekolah merupakan perluasan peran dan fungsi BP3.

Pembentukan komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang mengacu pada pedoman operasional dan indikator kinerja komite sekolah dan UU. Sisdiknas No. 20/2003 yang mengamanatkan bahwa peranan masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (pasal 56). Maka pembentukan komite sekolah ini menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan. Perlu ditegaskan bahwa lembaga komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang ini biasa disebut dengan dewan sekolah, karena pada dasarnya dewan sekolah di SMP Negeri 1 Malang itu sama dengan komite sekolah pada umumnya. Hanya perbedaan istilah saja.

Adapun organisasi komite sekolah ini berjumlah sembilan orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak dr. H. Karyono, Sp. PA selaku ketua komite sekolah mengatakan bahwa:

Sebenarnya komite sekolah itu berdiri karena rekomendasi dari pemerintah yang menetapkan komite sekolah sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat untuk kemajuan sekolah pada masing-masing satuan pendidikan. Oleh karena itu, di SMP Negeri 1 Malang ini didirikan komite sekolah⁹⁸

Komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang dibentuk oleh kepala sekolah. Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerja sama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

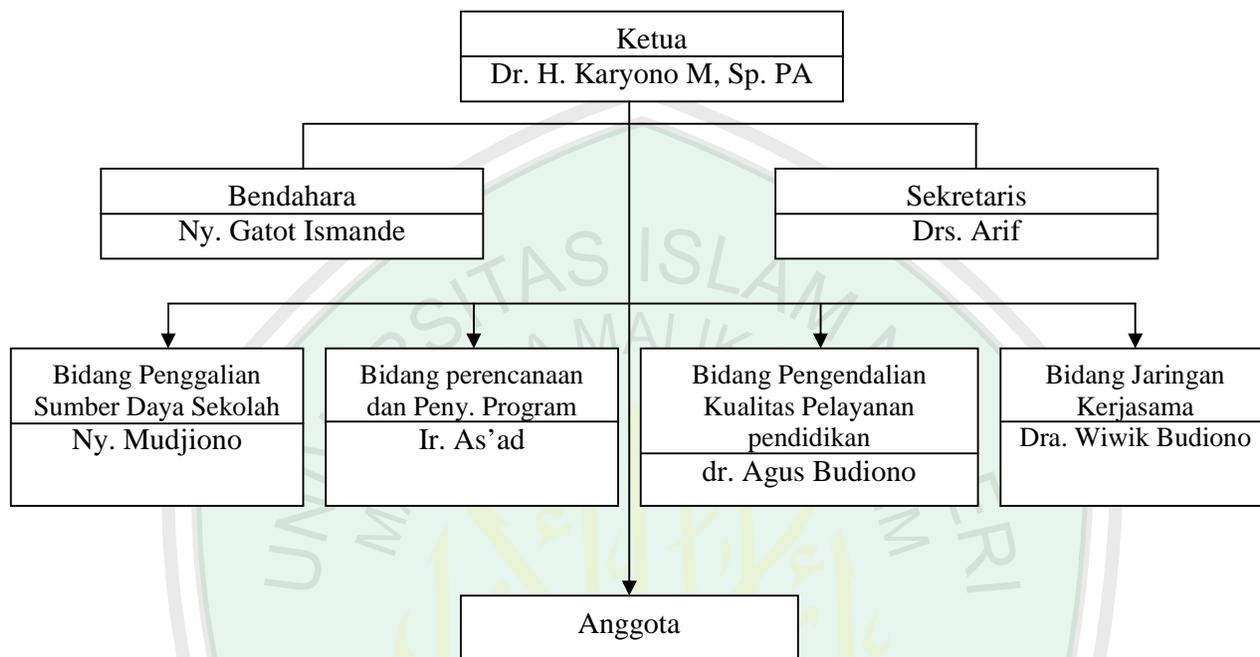
4. Struktur Organisasi Sekolah dan Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Malang

Dalam instansi lembaga perlu adanya struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka semua anggota mengetahui kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing.

Berkaitan dengan hal itu, untuk memperlancar jalannya pendidikan di SMP Negeri 1 Malang membentuk struktur yang tersusun sebagaimana dibawah ini:

⁹⁸ Wawancara dengan Karyono, Ketua Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Malang, tanggal 28 Mei 2008

Sedangkan struktur organisasi komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut:



Sumber: Dokumen SMP Negeri 1 Malang, Tahun Ajaran 2007/2008

GAMBAR III: STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 MALANG

5. Keadaan Guru di SMP Negeri 1 Malang

Guru merupakan faktor terpenting dalam pendidikan, karena sebagai seorang guru tidak hanya sebatas sebagai pengajar saja, melainkan juga sebagai pembimbing, pendorong/motivator, serta suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Untuk itu guru perlu memiliki keahlian dan ketrampilan yang diperlukan oleh peserta didik pada saat terjun ke masyarakat.

Guru atau tenaga pengajar SMP Negeri 1 Malang sebanyak 60 orang, termasuk kepala sekolah. Sebagian dari mereka ada yang berstatus sebagai Guru Tetap (GT) dan sebagian yang lain berstatus sebagai Guru Tidak Tetap (GTT). Di

samping tenaga pengajar, untuk memperlancar kegiatan pendidikan di SMP Negeri 1 Malang juga ada staf TU, pegawai perpustakaan, dan bagian gudang. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan guru dan staf lainnya yang membantu jalannya proses pendidikan di SMP Negeri 1 Malang dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis peroleh pada halaman lampiran.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa keadaan guru di SMP Negeri 1 Malang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan guru yang rata-rata telah menempuh jenjang pendidikan S1 bahkan ada beberapa guru yang telah menempuh jenjang S2 serta kesesuaian dengan bidang studi yang diajarkan. Sedangkan keadaan karyawan di SMP Negeri 1 Malang cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi guna menjalankan kelancaran proses belajar-mengajar.

Dengan adanya guru yang memiliki tingkat akademik yang tinggi dan berkualitas diharapkan para guru mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, guru juga dapat mendidik dan membimbing para siswa SMP Negeri 1 Malang menjadi siswa yang berkualitas dan siap bersaing dengan siswa-siswa dari sekolah lain.

Tetapi apabila diperhatikan jumlah guru di SMP Negeri 1 Malang khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ini mengalami kekurangan. Pada tabel tertera hanya ada dua orang guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, sedangkan jumlah kelas VII sampai IX terdiri dari antara delapan dan tujuh kelas. Dari sini dapat diketahui bahwa dengan adanya jumlah guru yang tidak sesuai dengan jumlah siswa, sehingga akan terjadi proses belajar-mengajar yang kurang efektif.

6. Keadaan Siswa-Siswi di SMP Negeri 1 Malang

Siswa merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan, karena siswa merupakan obyek pendidikan. Tanpa adanya siswa, maka tidak akan terjadi proses pengajaran. Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 27 Mei 2008 menunjukkan bahwa data siswa SMP Negeri 1 Malang periode 2007/2008 dapat dilihat pada halaman lampiran.

Untuk tahun ini SMP Negeri 1 Malang dalam penerimaan siswanya menampung sebanyak 8 kelas, maka SMP Negeri 1 Malang memiliki 22 kelas dengan jumlah keseluruhan siswanya sebanyak 834 siswa yang terdiri dari kelas I, II, dan III.

Dari apa yang dikemukakan oleh bapak kepala sekolah menyatakan bahwa para siswa berasal dari sekitar SMP Negeri 1 Malang. Setiap tahun diupayakan ada peningkatan jumlah siswa sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Malang.

SMP Negeri 1 Malang dengan berbagai sarana dan prasarana serta pendidikan yang memadahi setiap tahunnya, telah menghasilkan lulusan yang sangat baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar lulusannya diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan. Sehingga hal ini menarik perhatian masyarakat khususnya para orang tua untuk berkompetisi menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 1 Malang.

7. Keadaan Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 1 Malang

Suatu kegiatan pendidikan akan berhasil mencapai tujuan jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan baik. Tanpa adanya sarana dan

prasarana yang mendukung, kegiatan proses belajar mengajar tidak akan berjalan maksimal dan hal ini tentu saja sangat berpengaruh dengan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, sekolah harus mengupayakan sebaik mungkin dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan terutama kegiatan belajar-mengajar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 27 Mei 2008 diperoleh mengenai keadaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Malang dapat dilihat pada halaman lampiran.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Hal tersebut sangat membantu kelancaran kegiatan belajar-mengajar, karena sarana dan prasarana yang diinginkan oleh semua pihak sekolah dapat terpenuhi.

8. Prestasi Akademik dan Non Akademik SMP Negeri 1 Malang

Menurut data yang peneliti peroleh, SMP Negeri 1 Malang memiliki prestasi akademik yang gemilang, diantaranya:

- a. Menambah program percepatan belajar siswa (Program Akselerasi) tahun 2006,
- b. Menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tahun 2007
- c. Mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 tahun 2008 dalam rangka peningkatan sistem manajemen pendidikan.

Dengan melihat begitu baiknya prestasi akademik yang dimiliki SMP Negeri 1 Malang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa prestasi akademik siswa dalam aspek pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang ini juga baik, hal

ini didasarkan pada apa yang dikemukakan guru pendidikan agama Islam bahwa rata-rata nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa sebagian besar sudah di atas rata-rata, hanya ada sebagian kecil siswa yang masih di bawah rata-rata.

Sedangkan prestasi non akademik yang dimiliki siswa dalam aspek pendidikan agama Islam adalah setiap tahunnya SMP Negeri 1 Malang memperoleh juara dalam lomba Islami, diantaranya memenangkan juara II lomba pidato Bahasa Arab dan juara III lomba ceramah agama se-Malang Raya. Meskipun belum mendapat juara I dan juara umum, tetapi setidaknya sebagai sekolah umum, SMP Negeri 1 Malang tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya khususnya madrasah yang pada dasarnya adalah sekolah yang bernafaskan Islam.

B. Paparan Data

1. Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang cukup baik karena dalam kesehariannya SMP Negeri 1 Malang selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Ibu Nurotul Chasanah S.Ag selaku guru pendidikan agama Islam sebagaimana berikut:

Setiap hari sebelum jam pelajaran pertama dimulai, selalu dilakukan kegiatan imtaq yaitu membaca surat-surat pendek dan do'a-do'a selama kurang lebih 15 menit. Disamping itu, guru PAI juga memberikan buku sholat yang mana masing-masing siswa wajib melaporkan pada guru PAI apakah mereka sudah menjalankan sholat lima waktu atau belum sepenuhnya, bahkan tidak melakukan sama sekali⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan Nurotul Chasanah, Guru PAI SMP Negeri 1 Malang, tanggal 31 Mei 2008

Hal serupa juga diungkapkan oleh guru pendidikan agama Islam Bapak

S.A. Rochim S.Ag yang mengatakan bahwa:

Mutu pendidikan agama Islam di sini saya anggap baik, karena dilihat dari kemampuan mengajinya, mereka rata-rata sudah bisa. Hanya saja ada sebagian kecil anak yang kurang lancar dalam membacanya, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua untuk memberikan bimbingan mengaji kepada anaknya atau meletakkan anaknya di TPQ. Untuk itu solusinya kami guru agama memberikan jam tambahan bagi siswa yang kurang lancar dalam membaca al-Qur'an¹⁰⁰

Lebih lanjut dikemukakan pula oleh Ibu Hj. Sufairoh, S.Pd, MM selaku wakil kepala SMP Negeri 1 Malang sebagaimana berikut:

“Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang sudah baik karena telah memenuhi tercapainya sikap budi pekerti luhur dalam pendidikan yang didasari oleh iman dan taqwa yaitu sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 1 Malang itu sendiri”¹⁰¹

Sehubungan dengan hal ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan

Bapak kepala sekolah Drs. Burhanuddin M.Pd yang mengatakan bahwa:

Di SMP Negeri 1 Malang ini ada lima macam agama yang dianut oleh siswa dan guru agamanya juga lengkap semua agama, cuma untuk pendidikan agama Islam kami mempunyai dua guru agama. Hal itu karena mayoritas siswa di sini memeluk agama Islam. Meskipun demikian, kami dan guru agama Islam sepakat untuk membiasakan menanamkan nilai-nilai IMTAQ kepada anak didik kita sejak dini, agar nantinya menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Dengan membiasakan berdo'a dan membaca surat-surat pendek setiap pagi sebelum jam pelajaran pertama dimulai, sholat dhuhur secara berjama'ah, dan lain sebagainya¹⁰²

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh ketua komite sekolah Bapak dr. H.

Karyono, Sp. PA sebagai berikut:

“Saya kira mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang ini cukup baik karena dilihat dari begitu perhatiannya guru dan orang tua dalam memperhatikan prestasi pendidikan anaknya”¹⁰³

¹⁰⁰ Wawancara dengan S.A. Rochim, Guru PAI SMP Negeri 1 Malang, tanggal 31 Mei 2008

¹⁰¹ Wawancara dengan Sufairoh, Waka SMP Negeri 1 Malang, tanggal 27 Mei 2008

¹⁰² Wawancara dengan Burhanuddin, Kepala SMP Negeri 1 Malang, tanggal 27 Mei 2008

¹⁰³ Wawancara dengan Karyono, *op. cit.*

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa SMP Negeri 1 Malang mempunyai mutu pendidikan agama Islam yang cukup baik. Meskipun pada dasarnya SMP Negeri 1 Malang merupakan sekolah umum yakni sekolah yang tidak hanya menampung siswa yang beragama Islam saja, tetapi budaya keislamannya sangat kental.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa baiknya mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang dapat dilihat dari keseharian siswanya yang setiap pagi melakukan tadarrus surat-surat pendek dengan baik dan benar yang dilakukan 15 menit sebelum jam pertama dimulai, siswa aktif dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam, selalu *continue* melakukan shalat dhuhur secara berjama'ah, dan ketika istirahat, tidak sedikit siswa yang melakukan shalat sunnah dhuha. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesehariannya, SMP Negeri 1 Malang selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan khususnya agama Islam.

Sedangkan dari data dokumentasi yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa dari nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dalam bidang studi pendidikan agama Islam dari kelas VII dan VIII sebagian besar siswa memperoleh nilai di atas Standar Kelulusan Minimal (SKM), hanya ada sebagian kecil siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Dan di SMP Negeri 1 Malang ini juga mempunyai SKM yang tinggi termasuk SKM bidang studi pendidikan agama Islam yakni 75. Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan agama Islam yang ada di SMP Negeri 1 Malang ini memang cukup baik. Data dokumentasi tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

SMP Negeri 1 Malang juga menorehkan prestasi dalam bidang pendidikan agama Islam, diantaranya yaitu setiap tahunnya SMP Negeri 1 Malang

memperoleh juara lomba pidato bahasa arab dan ceramah agama se kota malang, meskipun tidak mendapatkan juara pertama setidaknya SMP Negeri 1 Malang dapat mengukir prestasi yang gemilang, karena dilihat dari latar belakangnya yang merupakan sekolah umum yang hanya sedikit mendapat masukan tentang keagamaan tetapi tidak kalah dengan sekolah lainnya.

2. Upaya Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang

Secara formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik.

Untuk mewujudkan peran dan fungsinya, komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang telah mengupayakan beberapa hal demi meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan agama Islam, baik dukungan materiil maupun non materiil. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Burhanuddin, M.Pd selaku kepala SMP Negeri 1 Malang:

Komite sekolah peranannya sangat mendukung dan baik sekali mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa, pengembangannya untuk mutu pendidikan agama Islam diantaranya yaitu setiap hari besar Islam komite selalu mempunyai andil dalam acara tersebut, dengan mengadakan lomba-lomba keislaman. Kemudian siswa yang menang dalam kompetisi tersebut ditindaklanjuti oleh para guru yang ahli dibidangnya yang selanjutnya akan diikuti dalam lomba-lomba tingkat Kabupaten, ataupun Propinsi.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan Burhanuddin, *op. cit.*

Lebih lanjut Bapak dr. H. Karyono, Sp. PA selaku ketua komite sekolah mengatakan bahwa:

Di SMP Negeri 1 Malang ini setiap hari jum'at pagi selalu diadakan *parent's day* yaitu orang tua yang berkompeten didaulat untuk memberikan petuah-petuah dakwah kepada anak didik agar nantinya siswa sedikit banyak mempunyai bekal untuk hidupnya di masa depan sebagai wujud dari pengembangan SDM¹⁰⁵

Di samping itu, komite sekolah juga ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar pendidikan agama Islam, baik formal maupun non formal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nurotul Chasanah S.Ag selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang sebagai berikut:

Adanya LCD di setiap kelas itu merupakan bantuan dari komite sekolah khususnya orang tua siswa dan itu juga karena sekolah kita ini kan telah menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Disamping itu, juga diadakan istighosah bagi wali murid kelas delapan yang akan mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN), tetapi hal itu baru dilaksanakan dua tahun ini¹⁰⁶

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh guru pendidikan agama Islam juga yaitu Bapak S.A. Rochim S.Ag dan anggota komite sekolah Ibu Hj. Mimin Kurnia, S.Pd dari tenaga kependidikan, sebagai berikut:

Dalam hal sarana dan prasarana komite sekolah ikut memberi bantuan dalam merenovasi musholla dan juga memberikan dana untuk pengadaan LCD, TV, dan DVD di tiap-tiap kelas. Dan juga ketika diadakan pondok Ramadhan itu konsumsinya diambil dari orang tua. Kemudian pada hari raya Idul Adha orang tua yang diwakili oleh komite sekolah juga ikut memberikan hewan qurban kepada sekolah¹⁰⁷

Setiap kali sekolah membutuhkan bantuan terutama dalam hal finansial, pihak komite sekolah khususnya orang tua langsung tanggap untuk

¹⁰⁵ Wawancara dengan Karyono, *op. cit.*

¹⁰⁶ Wawancara dengan Nurotul Chasanah, *op. cit.*

¹⁰⁷ Wawancara dengan S.A. Rochim, *op. cit.*

memberikan bantuan, dan ketika ada hal-hal yang sulit, komite sekolah dan pihak sekolah bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut¹⁰⁸

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian komite sekolah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan pendidikan.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang telah melakukan upayanya. Hal ini dapat dilihat pada setiap ruangan kelas terdapat sarana yang lengkap dan canggih, dan mushallanya juga lebih diperbesar dan diperbaiki sehingga akan membantu kelancaran proses belajar-mengajar khususnya pendidikan agama Islam. Kegiatan *parent's day* juga selalu dilakukan setiap hari jum'at dan dalam sebulan sekali komite sekolah beserta pihak sekolah juga rutin melaksanakan rapat.

Sedangkan dari data dokumentasi yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa untuk memperoleh dana yang dibutuhkan dalam perawatan, perbaikan dan perlengkapan gedung, pihak sekolah dan komite sekolah mengupayakan dengan menggali dana yang berasal dari bantuan pengembangan pendidikan orang tua/wali murid kelas VII setiap tahun ajaran baru, iuran wajib siswa di setiap bulannya dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) dari orang tua dengan sukarela dan ikhlas. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan komite sekolah setiap tahunnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mimin Kurnia, Anggota Komite Sekolah SMP Negeri 1 Malang, tanggal 31 Mei 2008

Malang termasuk pendidikan agama Islam yakni dalam bidang sarana dan prasarana. Data dokumentasi tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

3. Kendala Yang Dihadapi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang

Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam, sedikit banyak pasti mempunyai kendala-kendala yang dihadapi. Begitu pula yang dialami komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang juga mempunyai kendala yang harus mereka hadapi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak dr. H. Karyono, Sp. PA selaku ketua komite sekolah dan Ibu Hj. Mimin Kurnia S.Pd selaku anggota komite sekolah dari tenaga kependidikan sebagai berikut:

Kendala-kendala itu pasti ada, diantaranya yaitu dengan keterbatasan biaya yang membuat komite sekolah agak sulit menjalankan perannya, dan juga kurang kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya, mereka belum mengerti begitu pentingnya peran dan keikutsertaan orang tua terhadap pendidikan anaknya, yang mereka pahami hanya guru saja yang lebih bertanggung jawab¹⁰⁹

Kendalanya itu karena kurang adanya pihak yang bersedia menjadi pemberi beasiswa seperti pengusaha untuk kelancaran program komite sekolah, sehingga dana yang dibutuhkan masih kurang. Dan di SMP Negeri 1 Malang ini modelnya tidak ngoyo, maksudnya kalau ada dana ya jalan dan kalau belum ada dana ditunggu saja¹¹⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Drs. Burhanuddin, M.Pd selaku kepala SMP Negeri 1 Malang yang mengatakan bahwa:

Ada beberapa kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam ini, tetapi kendala itu kami anggap tidak begitu berat, yaitu yang utama adalah masalah biaya yang masih kurang sehingga pengembangan sekolah sedikit lambat, kadang anggota komite

¹⁰⁹ Wawancara dengan Karyono, *op. cit.*

¹¹⁰ Wawancara dengan Mimin Kurnia, *op. cit.*

sekolah juga kurang begitu aktif, yang selalu aktif di sini hanyalah pengurus inti. Bertolak dari itu semua, saya kira semua berjalan dengan baik¹¹¹

Lebih lanjut hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Nurotul Chasanah S.Ag selaku guru pendidikan agama Islam sebagaimana berikut:

Kurang kepedulian komite sekolah terhadap pendidikan agama Islam itu yang menjadi kendalanya. Dan juga perhatian komite sekolah itu masih dalam hal sarana dan prasarana saja yang lebih ditekankan. Untuk peningkatan mutu pendidikan agama Islam dalam hal keilmuan masih kurang¹¹²

Lain halnya yang dikemukakan oleh Bapak S.A. Rochim S.Ag yang menyatakan bahwa tidak ada kendala yang begitu berat yang dialami oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Beliau menganggap selama ini lancar-lancar saja.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kendala yang dihadapi komite sekolah secara umum yaitu dalam segi kurang kepedulian masyarakat khususnya orang tua terhadap pendidikan, sehingga diperlukan adanya sosialisasi tentang peran dan fungsi komite sekolah kepada masyarakat yang belum diefektifkan. Di samping itu, peran komite sekolah di sini masih mengutamakan pengumpulan dana dan fisik sekolah saja, dan kurang menyentuh program non fisik.

Sedangkan dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa kendala yang dihadapi komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam yaitu tidak adanya kantor komite sekolah yang tidak disediakan oleh pihak sekolah. Hal tersebut menyebabkan komite sekolah kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga ketika akan melakukan

¹¹¹ Wawancara dengan Burhanuddin, *op. cit.*

¹¹² Wawancara dengan Nurotul Chasanah, *op. cit.*

koordinasi dengan anggotanya, komite sekolah sulit untuk bertemu dan berkumpul. Disamping itu, kesibukan di antara masing-masing pengurus dan anggota juga merupakan kendala yang dihadapi komite sekolah, karena pada dasarnya bidang yang mereka geluti tidak hanya dalam lembaga komite sekolah saja, ada yang sebagai dokter, pengusaha, wiraswasta dan lain-lain.

Dari data dokumentasi yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang masih difokuskan pada urusan fisik yaitu masih berkuat pada pendanaan sekolah saja, dan kurang menyentuh urusan non fisik. Karena untuk kebutuhan gedung dan perlengkapan lainnya, yang dimiliki SMP Negeri 1 Malang masih terbatas sehingga untuk saat ini masalah fisiklah yang lebih diperhatikan. Hal tersebut kurang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri maupun oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, karena pada dasarnya peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Badan tersebut juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Di samping itu juga Komite Sekolah berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Jadi kendala yang juga dihadapi komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang adalah kurang memperhatikan masalah non fisik seperti pembelajaran, tenaga kependidikan, pemikiran dan lain sebagainya. Data dokumentasi tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menjawab apa yang sudah peneliti temukan dengan beberapa data yang sudah ditemukan, baik dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berangkat dari sini, peneliti mencoba mendeskripsikan data-data yang telah peneliti temukan berdasarkan dari logika dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada yang kemudian diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baru.

Sesuai dengan teknik analisa yang sudah peneliti kemukakan pada bab III yaitu bahwasanya peneliti menggunakan teknik analisisnya dengan kualitatif deskriptif (menggambarkan) untuk menjelaskan semua temuan yang sudah ada, baik itu dari hasil observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi. Adapun pembahasannya juga berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan.

A. Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang

Di negara Indonesia saat ini, masalah peningkatan mutu pendidikan Islam selalu menjadi pembahasan yang menarik. Masalah yang ada, 1) pendidikan Islam yang kuantitasnya begitu besar dan tersebar di seluruh penjuru negeri telah begitu kuat mengakar di dalam hati masyarakat Indonesia yang memang mayoritas muslim, serta 2) telah terjadi kemerosotan mutu pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tingkat pendidikan tinggi. Hal ini berlangsung akibat penyelenggaraan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas dan kurang dibarengi dengan aspek kualitasnya. dan pembelajaran yang fokus orientasinya bersifat *subject*

matter oriented dalam arti memahami dan menghafal pelajaran sesuai dengan kurikulum saja.

Dalam aspek pendidikan, faktor penting yang harus diperhatikan adalah masalah mutu. Kalau digunakan *input-proses-output*, akan tampak bahwa baik sekolah umum maupun madrasah sama-sama menghadapi pada persoalan ketiganya dalam hal mutu.¹¹³ Salah satu masalah mutu yang dihadapi di dunia pendidikan adalah rendahnya mutu lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu hanya dihasilkan oleh proses pendidikan yang bermutu pula secara keseluruhan termasuk pendidikan agama Islam. Proses ini harus didukung dengan adanya *input-input* yang bermutu seperti: siswa, administrator, guru, konselor dan tata usaha yang bermutu. Dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, biaya yang cukup, manajemen yang baik serta lingkungan yang mendukung, dari lingkungan sekolah, sekitar sekolah, masyarakat dan lingkungan keluarga.¹¹⁴

Menurut Danim, hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu¹¹⁵

Di SMP Negeri 1 Malang sudah peneliti anggap mempunyai mutu yang baik. Dilihat dari mutu masukan yang berasal dari siswa yang mempunyai prestasi yang baik, karena di SMP Negeri 1 Malang ini terdapat tiga proses untuk penerimaan siswa baru, yaitu melalui program akselerasi, SBI, dan regular. Sehingga dapat dipastikan siswa yang diterima di sekolah ini adalah siswa pilihan yang mampu melewati salah satu dari tiga program tersebut. SMP Negeri 1 Malang juga mempunyai para guru,

¹¹³ Dedi Supriadi, *op. cit.*, hlm. 142

¹¹⁴ Sudarwan Danim, *op. cit.*, hlm. 53

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 53

staf TU, konselor dan administrator yang mempunyai keahlian dibidangnya dan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap mulai dari ruang kelas, lapangan, laboratorium, dan musholla khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan agama Islam yang mempunyai fasilitas canggih dan lengkap sehingga mempermudah guru dan siswa untuk melaksanakan proses belajar-mengajar. Hanya yang masih kurang adalah belum adanya aula karena masih dalam tahap perencanaan.

Perlu dicatat bahwa mutu pendidikan di sekolah, khususnya proses belajar-mengajar di kelas bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan tergantung pada banyak masukan (*input*) yang meliputi masukan siswa, masukan instrumental, dan masukan lingkungan.¹¹⁶ Pada mutu proses ini, karena SMP Negeri 1 Malang telah memiliki mutu masukan yang cukup baik, maka dalam proses belajar-mengajarnya juga sudah terlaksana dengan baik. Dalam mengajar pendidikan agama Islam, gurunya menggunakan metode yang inovatif dan siswa merespon dengan aktif sehingga proses belajar-mengajar berjalan dengan lancar.

Dengan didukungnya mutu masukan dan mutu proses yang cukup baik, maka tidak dapat dipungkiri bahwa SMP Negeri 1 Malang ini dapat menghasilkan mutu lulusan yang baik pula. Hal ini dibuktikan dari siswa-siswi lulusan SMP Negeri 1 Malang yang sebagian besar diterima di SMA Negeri unggulan. Sehingga banyak dari masyarakat yang berlomba-lomba ingin menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 1 Malang. Dan tidak kalah baiknya, pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang juga mempunyai mutu yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari siswa lulusan SMP Negeri 1 Malang yang minimal bisa membaca al-Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.

¹¹⁶ Dedi Supriadi, *op. cit.*, hlm. 142-143

Peningkatan mutu pendidikan hanya dapat dicapai melalui pendekatan terpadu (terintegrasi) dan menyeluruh (komprehensif). Terpadu dalam arti bahwa seluruh unsur yang bertanggung jawab terhadap pendidikan (yaitu orang tua, pemerintah dan masyarakat) secara bersama-sama melakukan tindakan aktif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komprehensif dalam arti bahwa peningkatan kualitas pendidikan dilakukan secara menyeluruh melalui penerapan, peningkatan dan atau perbaikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Peran Serta Masyarakat (PSM), dan Pembelajaran Akif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM).¹¹⁷

B. Upaya Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang

Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) orang tua merupakan *stake holder* yang berkepentingan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana *stake holder*, orang tua dapat menuntut kualitas mutu pendidikan yang diperoleh anak-anaknya, kepada penyelenggara pendidikan yaitu sekolah dan pemerintah.

Disisi lain pihak sekolah dapat melibatkan secara aktif orang tua maupun komite sekolah dalam meningkatkan mutu proses pendidikan. Pelibatan orang tua secara aktif bagi sekolah pertama-tama berorientasi pada pemberdayaan sekolah bukan untuk mendikte pengelolaan sekolah.

Melihat kenyataan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan masih terbatas, maka harus diadakan upaya serius untuk meningkatkan pengetahuan akan pentingnya pendidikan serta pentingnya peran masyarakat dan pendidikan non formal

¹¹⁷ Syaiful Sagala, *op. cit.* hlm. 37

dalam mendukung upaya pendidikan formal. Secara konseptual, perwakilan masyarakat sebagai *stake holder* (pemangku kepentingan) pendidikan yaitu dengan memberdayakan komite sekolah di satuan pendidikan.¹¹⁸

Komite sekolah itu tidak selalu berorientasi pada uang, tetapi juga pada hal-hal yang dapat diadakan bersama, seperti membentuk sistem belajar yang baik, turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang ada dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dapat dikerjakan bersama tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi komite sekolah itu tidak harus dibentuk untuk membiayai sekolah tersebut dan yang terpenting jika suatu daerah tergolong miskin bukan berarti tidak dapat terbentuk komite sekolah, sebab dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dengan berbagai cara dan tidak hanya dengan uang.

Menurut Satori (2001:8) kontribusi komite sekolah terhadap sekolah yang menyangkut kelembagaan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah, memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi *stake holder* sekolah, dan membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah.¹¹⁹

Komite sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Malang selalu mengupayakan hal-hal yang dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah baik

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 239-240

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 242

secara fisik maupun non fisik, termasuk dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

Upaya yang dilakukan komite sekolah di SMP Negeri 1 Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam diantaranya adalah:

1. mengadakan *parent's day* yaitu anggota komite sekolah terutama orang tua memberikan ceramah atau petuah-petuah kepada siswanya untuk dijadikan bekal di waktu mendatang yang diadakan setiap hari jum'at pagi,
2. mengadakan rapat-rapat rutin dengan pihak sekolah untuk kemajuan dan pengembangan sekolah,
3. bersama pihak sekolah menarik bantuan kepada orang tua/wali murid untuk biaya pembangunan dan pengembangan sekolah, terutama pada saat penerimaan siswa baru.
4. pada hari-hari besar Islam, komite sekolah juga berperan serta dalam menyumbang atau memberi bantuan kepada pihak sekolah baik fisik maupun non fisik. Seperti: ketika hari raya Idul Adha, komite sekolah juga ikut menyumbangkan hewan qurban, dan ketika Maulid Nabi SAW. komite sekolah yang mengadakan lomba-lomba Islami,
5. komite sekolah khususnya orang tua siswa kelas III juga mengikuti istighosah yang diadakan oleh sekolah untuk berdo'a agar siswa kelas III diberi kelulusan semua oleh Allah SWT.,
6. memberi bantuan secara fisik yang berupa TV, DVD, dan LCD di setiap masing-masing kelas sebagai wujud dari SMP Negeri 1 Malang merupakan sekolah yang menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

C. Kendala Yang Dihadapi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Malang

Saat ini hampir di seluruh sekolah telah terbentuk komite sekolah. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar komite sekolah tersebut, baik proses pembentukan, susunan kepengurusannya, maupun pelaksanaan fungsi perannya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri maupun oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selama ini komite sekolah telah terbentuk, namun belum berjalan secara maksimal.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, komite sekolah mempunyai kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya yaitu masyarakat masih mempunyai pandangan lama bahwa sekolah atau pendidikan itu tanggung jawab pemerintah/sekolah saja dan bukan tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat dan pemerintah. Dan kurang mensosialisasikan konsep komite sekolah untuk menjamin agar seluruh unsur di masyarakat memahami secara benar mengenai apa, siapa dan bagaimana peran dan fungsi komite sekolah.

Kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya terletak dalam hal teknik dan administrasi serta dalam diri pribadi masing-masing personil komite sekolah. Dan kendala eksternalnya terletak pada orang tua siswa dan masyarakat serta dari sekolah.¹²⁰

Begitu juga halnya di SMP Negeri 1 Malang, kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam ada 2, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal antara lain:

¹²⁰ Siti Komariyah, *op. cit.*

1. keterbatasan biaya yang dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam,
2. kurangnya kepedulian atau perhatian komite sekolah terhadap mutu pendidikan agama Islam,
3. kurang adanya pihak yang memberikan beasiswa (dari dunia industri atau yang lainnya) dalam mendukung kegiatan komite sekolah dan kemajuan sekolah,
4. yang menjadi perhatian komite sekolah masih dalam hal fisik saja dan kurang memperhatikan masalah non fisik.

Sedangkan kendala eksternalnya antara lain:

1. peran serta masyarakat dan orang tua/wali murid yang masih kurang dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh komite sekolah,
2. dari pihak sekolah kurang begitu menggerakkan komite sekolah,
3. tidak disediakan kantor komite sekolah oleh pihak sekolah,
4. tingkat kesadaran dan pengetahuan keagamaan masyarakat dan orang tua yang tergolong rendah, sehingga hanya dari sekolah saja siswa memperoleh pengetahuan keagamaan dan itupun masih sangat kurang apabila tidak didukung dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang ini adalah:

1. Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang cukup baik, karena dapat dilihat dari *input*, proses dan *outputnya* yaitu siswa yang mempunyai prestasi unggul, para guru, staf TU, konselor dan administrator yang ahli dan juga didukung sarana dan prasarana yang lengkap, serta siswanya mempunyai prestasi akademik dan non akademik yang baik, siswa lulusannya sebagian besar diterima di SMA Negeri unggulan, bisa membaca al-Qur'an dan rutin melaksanakan shalat.
2. Upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang diantaranya yaitu: a) mengadakan *parent's day*, b) mengadakan rapat rutin, c) menarik bantuan biaya kepada orang tua/wali murid, d) ikut andil dalam perayaan hari besar Islam, e) mengikuti istighosah, dan f) memberi bantuan fisik.
3. Kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Malang ada 2, yaitu kendala internal antara lain: a) keterbatasan biaya; b) kurang adanya pihak yang memberikan beasiswa; c) perhatian komite sekolah terhadap mutu pendidikan agama Islam kurang; d) perhatian komite sekolah masih dalam hal fisik, dan kendala eksternal antara lain: a) kurangnya partisipasi masyarakat dan orang tua; b)

sekolah kurang menggerakkan komite sekolah; c) tidak adanya kantor komite sekolah; d) rendahnya tingkat keagamaan masyarakat dan orang tua.

B. Saran-Saran

1. Dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, komite sekolah seharusnya lebih meningkatkan hubungan kerja sama, baik dengan guru pendidikan agama Islam, orang tua siswa maupun lembaga-lembaga keagamaan. Agar tercipta sikap toleransi dan saling mendukung dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
2. Dalam mengupayakan peningkatan mutu pendidikan agama Islam, hendaknya komite sekolah lebih memperhatikan masalah non fisik juga dan tidak hanya memperhatikan masalah fisik, supaya tercipta keseimbangan antara kebutuhan fisik dan non fisik. Sehingga antara aspek kuantitas dan aspek kualitas dapat meningkat secara bersama-sama.
3. Pihak sekolah hendaknya menyediakan kantor bagi komite sekolah agar pengurus komite sekolah lebih sering berada di sekolah untuk ikut berperan serta dalam pengembangan dan peningkatan mutu sekolah, sehingga komite sekolah lebih mengetahui secara mendalam bagaimana proses pendidikan itu dilakukan dan bekerja sama dengan pihak sekolah apabila terdapat hal-hal yang perlu dibenahi dalam sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Forum, *Mewujudkan Pendidikan Bermutu* ([http:// www. Google. Com. k4dOeT@gmail](http://www.Google.Com.k4dOeT@gmail). Diakses 22 April 2008)
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1998. Semarang: Toha Putra.
- Arcaro, Jerome S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief Effendi, Muh. *Pemberdayaan Komite Sekolah* ([http://www. Google. Com](http://www.Google.Com). Di akses 11 April 2008)
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budimansyah, Dasyim. *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah* ([http:// www. Google. Com](http://www.Google.Com), diakses 1 Oktober 2007)
- Danim, Sudarwan. 2006. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Djumransjah. 2004. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Malang: Bayu Media.
- Fuad Yusuf, Choirul, dkk. 2006. *Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI.
- FIP-IKIP Malang, Tim Dosen. 1981. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khaeruddin, dkk. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet. II.
- Komariyah, Siti. *Komite Sekolah Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam* ([http://www. Google. Com](http://www.Google.Com). Di akses 22 April 2008)
- Mardiyono. *Menyoal Peran Komite Sekolah* ([http:// www. Google. Com](http://www.Google.Com), diakses 1 Oktober 2007)
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin. 2007. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mulyasa, E. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Rosda Karya. Cet. X.
- Nasution. 1991. *Metode Research*. Bandung: Jemmars.
- Poerdawarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- SK No. 044/U/2002, Kepmendiknas. *Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Citra Umbara.
- Soejoso, Soenarjo. *Komite Sekolah Perlu Proses Bertahap dan Komitmen Jangka Panjang* ([Http:// www. Google. Com](http://www.Google.Com). Kompas, di akses 1 Oktober 2007)
- Sudrajat, Hari. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Bandung: CV. Cekas Grafika.
- Sukirno. 2006. *Pedoman Kerja Komite Sekolah*. Jogjakarta: Pustaka Widiyatama.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, dkk. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung: PT. Revika Adi Tama.
- Sukron. *Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN Semarang* ([http:// www. Google. Com](http://www.Google.Com), di akses 1 Oktober 2007).
- Supriadi, Dedi. 2004. *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Suryadi, Ace. 1992. *Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Depdikbud.
- Syafruddin. 2005. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Tilaar, dan Suryadi. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, *Dewan Pendidikan & Komite Sekolah* ([http://www. Google. Com](http://www.Google.Com). pakguruonline. pendidikan. net. Di akses 22 April 2008)
- Undang-undang Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra umbara.

- Uno, Hamzah B. 2007. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. I.
- Umaedi. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* ([http:// www. Google. Com](http://www.Google.Com), di akses 11 April 2008)
- _____. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. Malang: Jurnal Administrasi Pendidikan FKIP UM Press.
- _____. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Warsolin. 2007. *Penilaian Mandiri (Self Assessment) Kinerja Komite Sekolah di MTs Gresik (Studi Kasus pada MTSN dan MTS Yasmu)*. Tesis Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang.

